

SKRIPSI

ANALISIS *VALUE FOR MONEY* PADA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP) DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU



Oleh:

HAYATUL MA'RIFAH
175310725

PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022

SKRIPSI

ANALISIS *VALUE FOR MONEY* PADA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP) DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU

*Disusun dan diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau*



Oleh:

HAYATUL MA'RIFAH
175310725

PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax: (0761) 6748834 Pekanbaru 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Hayatul Ma'rifah
NPM : 175310725
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Value For Money Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau

Disahkan Oleh:
PEMBIMBING

Dr. H. Zulhelmy, SE., MSI., AK., CA., ACPA

Mengetahui:

DEKAN

KETUA PRODI

Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :





UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp: (0761) 674674 Fax: (0761) 674834 Pekanbaru 28284

TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama : Hayatul Ma'rifah
NPM : 175310725
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Penelitian : Analisis *Kulve For Money* pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau

Disetujui Oleh

Tim Penguji

1. Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
2. Lintang Nur Agya, SE., M.Acc., Ak.

Tanda Tangan

()
()

Pembimbing



Dr. H. Zulhelmy Hatta, SE., M.Si., Ak., CA.

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi S1



Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022

NPM : 175310725
 Nama Mahasiswa : HAYATUL MA'RIFAH
 Dosen Pembimbing : 1. Dr. H ZULHELMI SE., M.Si.,Ak., CA. ACPA 2.
 Program Studi : AKUNTANSI
 Judul Tugas Akhir : ANALISIS VALUE FOR MONEY PADA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP) DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : VALUE FOR MONEY ANALYSIS ON PERFORMANCE ACCOUNTABILITY REPORTS OF GOVERNMENT INSTITUTIONS (LAKIP) DEPARTMENT OF FOOD, FOOD CROPS AND HORTICULTURE, RIAU PROVINCE

Lembar Ke :

Dokumen ini adalah Arsip Mhik :

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	22 Oktober 2020	Data pendukung pembuatan proposal	Sudah diperbaiki	
2	24 Juli 2021	Telaah pustaka dan daftar pustaka minimal tahun 2011	Sudah diperbaiki	
3	2 Agustus 2021	Proposal disetujui untuk diseminarkan	Sudah diperbaiki	
4	1 April 2022	-Bab 4 dan Bab 5 -Melengkapi dengan abstrak	Sudah diperbaiki	
5	6 April 2022	-format penulisan -perbaiki saran -teknis daftar pustaka	Sudah diperbaiki	
6	7 April 2022	Skripsi disetujui untuk diseminarkan	Sudah diperbaiki	

Pekanbaru,.....
 Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



MTC1MZEWNZ1

(Siska, SE. M.Si Ak, CA.)

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
 2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
 3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
 4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
 5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopinya dilampirkan pada skripsi.
- Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpovan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau No: 646/KPTS/FE-UIR/2022, Tanggal 28 Juni 2022, Maka pada Hari Rabu 29 Juni 2022 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau pada Program Studi Akuntansi S1 Tahun Akademis 2021/2022

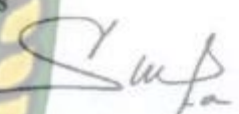
- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama | : Hayatul Ma'rifah |
| 2. NPM | : 175310725 |
| 3. Program Studi | : Akuntansi |
| 4. Judul skripsi | : Analisis Value For Money Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau. |
| 5. Tanggal ujian | : 29 Juni 2022 |
| 6. Waktu ujian | : 60 menit. |
| 7. Tempat ujian | : Ruang sidang meja hijau FEB UIR |
| 8. Lulus Yudicium/Nilai | : Lulus (B) 74,9 |
| 9. Keterangan lain | : Aman dan lancar. |

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan Bidang Akademis


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA
Ketua Prodi Akuntansi S1

Dosen penguji :

1. Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA, ACPA
2. Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
3. Lintang Nur Agya, SE., M.Acc., Ak


.....

.....

.....

Notulen

1. Halimahtussakdiah, SE., M.Ak., Ak., CA


.....

Pekanbaru, 29 Juni 2022

Mengetahui
Dekan,



Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Kuasa No : 510/A-UIR/5-FEB/2022

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 646 / Kpts/FE-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau dilak sanakan ujian skripsi / oral comprehensive sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji.
2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/II/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.
7. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangun
b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen
c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1
d. Nomor : 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:
- N a m a : Hayatu Masrifah
N P M : 175310725
Program Studi : Akuntansi S1
Judul skripsi : Analisis Value For Money Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.
2. Penguji ujian skripsi/oral comprehensive maahsiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Bidang Diuji	Jabatan
1	Dr. Zulhelmy, SE., M.Si, Ak., CA	Lektor Kepala, D/a	Materi	Ketua
2	Dina Hidayat, SE., M.Si, Ak	Assisten Ahli, III/a	Sistematika	Sekretaris
3	Lintang Nur Agia, SE., M.Acc., Ak	Asisten Ahli C/b	Methodologi	Anggota
4			Penyajian	Anggota
5			Bahasa	Anggota
6	Halimahtussakdiah, SE., M.Ak. CA	Assisten Ahli, C/b	-	Notulen
7			-	Saksi II
8			-	Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 29 Juni 2022
Dekan

Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

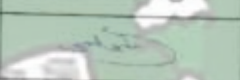
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

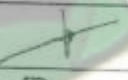

BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Hayatul Ma'rifah
NPM : 175310725
Jurusan : Akuntansi / S1
Judul Skripsi : Analisis Value For Money Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau
Hari/Tanggal : Rabu, 29 Juni 2022
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

Dosen Pembimbing

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA		


Dosen Pembahas / Penguji

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA		
2	Lintang Nur Agya, SE., M.Acc., Ak		

Hasil Seminar : *)

1. Lulus (Total Nilai)
2. Lulus dengan perbaikan (Total Nilai 77,5)
3. Tidak Lulus (Total Nilai)

Mengetahui
An.Dekan


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan I



Pekanbaru, 29 Juni 2022
Ketua Prodi


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

*) Coret yang tidak perlu

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647




BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Hayatul Ma'rifah
 NPM : 175310725
 Judul Proposal : Analisis Value For Money Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau.
 Pembimbing : I. Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA
 Hari/Tanggal Seminar : Rabu 08 September 2021

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :

1. Judul : Disetujui dirubah/perlu diseminarkan *)
2. Permasalahan : Jelas/masih kabur/perlu dirumuskan kembali *)
3. Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki *)
4. Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki *)
5. Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas *)
6. Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang *)
7. Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas *)
8. Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas *)
9. Sumber data : Jelas/tidak jelas *)
10. Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas *)
11. Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas *)
12. Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian *)
13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat *)
14. Kesimpulan tim seminar : Perlu/tidak perlu diseminarkan kembali *)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA	Ketua	1. 
2.	Yusrawati, SE., M.Si	Anggota	2. 
3.	Rona N. Oktaviani, SE., M.Ak	Anggota	3. 

*Coret yang tidak perlu

Mengetahui
An.Dekan Bidang Akademis


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA



Pekanbaru, 08 September 2021
Sekretaris,


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor: 1106/Kpts/FE-UIR/2020
TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1
Bismillahirrohmanirrohim
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Surat penetapan Ketua Jurusan / Program Studi Akuntansi tanggal 28 April 2020 tentang penunjukan Dosen Pembimbing skripsi mahasiswa.
 2. Bahwa dalam membantu mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik perlu ditunjuk Dosen Pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap Mahasiswa tersebut

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003
 2. Undang-Undang RI Nomor:14 Tahun 2005
 3. Undang-Undang RI Nomor:12 Tahun 2012
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 4 Tahun 2014
 5. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
 a. Nomor : 192/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Eko. Pembangun
 b. Nomor : 197/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Manajemen
 c. Nomor : 197/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Akuntansi S1
 d. Nomor : 001/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/I/2014 Tentang Akreditasi D.3 Akuntansi
 6. Surat Keputusan YLPI Daerah Riau
 a. Nomor: 66/Skep/YLPI/II/1987
 b. Nomor: 10/Skep/YLPI/IV/1987
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 8. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Riau tanggal 10 Maret 1987
 a. Nomor: 510/A-UIR/4-1987

MEMUTUSKAN

Menetapkan: 1. Mengangkat Saudara-saudara yang tersebut namanya di bawah ini sebagai Pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu:

No	N a m a	Jabatan/Golongan	Keterangan
1	Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si, Ak, CA	Lektor Kepala, D/a	Pembimbing

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah:

N a m a : Hayatul Ma'rifah
 N P M : 175310725
 Jurusan/Jenjang Pendd. : Akuntansi / S1
 Judul Skripsi : Analisis Value For Money Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau

3. Tugas pembimbing adalah berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor: 52/UIR/Kpts/1989 tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa di lingkungan Universitas islam Riau.
 4. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya memperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal
 5. Kepada pembimbing diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini segera akan ditinjau kembali.
 Kutipan: Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan menurut semestinya.

Ditetapkan di: Pekanbaru
 Pada Tanggal: 03 September 2020
 Dekan,


Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA

Tembusan : Disampaikan pada:

1. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau
2. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Email : info@uir.ac.id Website : www.eoo.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau
Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : HAYATUL MA'RIFAH
NPM : 175310725
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Skripsi : ANALISIS VALUE FOR MONEY PADA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP) DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi yaitu 30% pada setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*, Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas pustaka. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 27 Juli 2022

Seksi Program Studi Akuntansi



Siska SE., M.Si., Ak., CA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

ANALISIS *VALUE FOR MONEY* PADA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP) DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain. Yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya yang disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Pekanbaru, 2 Agustus 2022

Yang memberi pernyataan,



Hayatul Ma'rifah
175310725

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau pada objek penelitian yaitu Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisa dan mengukur kinerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau pada tahun 2019 dan 2020 dengan menggunakan prinsip *Value For Money*. Teknik yang digunakan untuk menganalisa penelitian ini adalah analisis deskriptif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau pada tahun 2019 dan 2020 telah ekonomis dan efisien namun belum memenuhi kriteria efektif menurut prinsip *Value For Money*. Setelah dilakukan pengukuran pada setiap kegiatan yang ada pada program Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, didapatkan hasil total tingkat ekonomis tahun 2019 sebesar 79,61% dan pada tahun 2020 sebesar 88,38% dimana nilai tersebut termasuk pada kategori Ekonomis. Pada pengukuran efisien, total tingkat efisien pada tahun 2019 yaitu sebesar 122,44% dan 2020 sebesar 105,57%, nilai ini termasuk dalam kategori efisien dan pada pengukuran efektifitas tahun 2019 memiliki nilai total 82,23% dan tahun 2020 87,60% yang artinya kinerja pada tahun 2019 dan 2020 termasuk ada kategori tidak efektif.

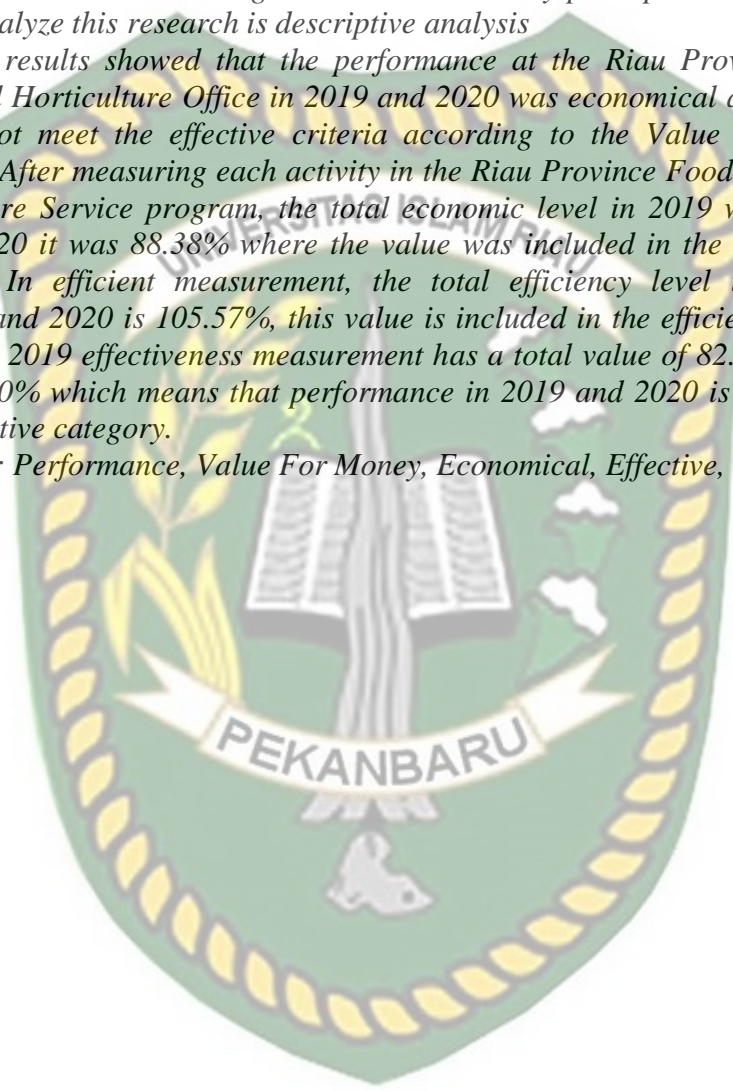
Kata Kunci: Kinerja, *Value For Money*, Ekonomis, Efektif, Efisien

ABSTRACT

This research was conducted in Pekanbaru City, Riau Province on the object of research, namely the Department of Food, Food Crops and Horticulture, Riau Province. The purpose of this study is to analyze and measure the performance of the Riau Province Food, Crops and Horticulture Office in 2019 and 2020 using the Value For Money principle. The technique used to analyze this research is descriptive analysis

The results showed that the performance at the Riau Province Food, Crops and Horticulture Office in 2019 and 2020 was economical and efficient but did not meet the effective criteria according to the Value For Money principle. After measuring each activity in the Riau Province Food, Crops and Horticulture Service program, the total economic level in 2019 was 79.61% and in 2020 it was 88.38% where the value was included in the Economical category. In efficient measurement, the total efficiency level in 2019 is 122.44% and 2020 is 105.57%, this value is included in the efficient category and in the 2019 effectiveness measurement has a total value of 82.23% and in 2020 87.60% which means that performance in 2019 and 2020 is included in the ineffective category.

Keywords: *Performance, Value For Money, Economical, Effective, Efficient*



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur penulis sampaikan pada Allah Subhanahuwata'ala., karena berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul "*Analisis Value For Money Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau*". Penulisan skripsi ini diselesaikan dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini sangat sulit bagi penulis untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Ibu Dr. Eva Sundari, SE.,MM.,CRBC selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
3. Ibu Dr. Siska, SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku ketua Jurusan Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. H. Zulhelmy Hatta, SE., M.Si.,Ak., CA.,ACPC selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak/Ibu dosen Universitas Islam Riau Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis selama proses

perkuliahan. Semoga ilmu yang diberikan dapat berguna dikemudian hari dan selalu diberkahi oleh Allah SWT.

6. Teristimewa kepada kedua orang tua dan adik-adik penulis atas segala kasih sayang, dukungan dan doa yang tiada henti untuk penulis.
7. Bapak/Ibu pegawai Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau yang telah bersedia memberikan waktu dan data yang di perlukan penulis.
8. Terimakasih kepada Gustia Sari Rahayu, Felia Putri Arinda, Mutiara Sri Balqis sebagai rekan bisnis penulis :Zeabeau Store, dan Rido Hakki atas dukungan dan bantuan semangatnya kepada penulis dalam pengerjaan penulisan ini dan kepada teman-teman seperjuangan khususnya Akuntansi kelas B 2017
9. *Last but not least, i wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times*

Penulis sangat menyadari penulisan ini jauh dari kata sempurna yang tak terlepas dari keterbatasan dan pengalaman penulis oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran guna untuk membangun dan menyempurnakan pengetahuan penulis.

Pekanbaru, Juni 2022

Penulis,

HAYATUL MA'RIFAH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	10
2.1 Telaah Pustaka	10
2.1.1 Organisasi Sektor Publik	10
2.1.2 Pengertian Kinerja Keuangan	11
2.1.3 Kinerja Keuangan	12
2.1.4 Akuntabilitas	13
2.1.5 <i>Value for money</i>	14
2.2 Hipotesis	17
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	19
3.1 Desain Penelitian	19
3.2 Objek Penelitian	19
3.3 Definisi Variabel Penelitian	19
3.3.1 <i>Value For Money</i>	19
3.3.2 Kinerja Keuangan.....	23
3.4 Jenis dan Sumber data	24
3.5 Teknik Pengumpulan Data	24
3.6 Teknik Analisis Data	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	25
4.2 Hasil Perhitungan <i>Value For Money</i>	30
4.3 Pembahasan Hasil Perhitungan <i>Value For Money</i>	90
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	95
5.1 Simpulan.....	95
5.2 Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Laporan Alokasi dan Realisasi Anggaran.....	4
Tabel 4.1	Indikator Kinerja Program SKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan Provinsi Riau.....	30
Tabel 4.2	Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Belanja Langsung Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.....	37
Tabel 4.3	Hasil Perhitungan Ekonomis Program Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau tahun 2019	41
Tabel 4.4	Hasil Perhitungan Ekonomis Program Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau tahun 2020	51
Tabel 4.5	Hasil Perhitungan Efisien Program Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau tahun 2019	59
Tabel 4.6	Hasil Perhitungan Efisien Program Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau tahun 2020	69
Tabel 4.7	Hasil Perhitungan Efektif Program Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau tahun 2019	75
Tabel 4.8	Hasil Perhitungan Efektif Program Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau tahun 2020	84
Tabel 4.9	Hasil Perhitungan Ekonomis, Efisien dan Efektif Program Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau tahun 2019 dan 2020	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Struktur Organisasi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau	28
------------	---	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberhasilan penerapan *Good Governance* tidak terlepas dari pengaruh faktor internal organisasi. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam perusahaan, salah satunya adalah budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan dukungan perusahaan untuk pengembangan etika dan teknologi pelatihan yang terus-menerus untuk meningkatkan hubungan dan keselarasan para anggota organisasi dan pengaruh yang penting setiap aspek dari operasi perusahaan.

Instansi pemerintahan merupakan kumpulan orang-orang yang dipilih secara khusus untuk melaksanakan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan. Dalam sebuah organisasi potensi Sumber Daya Manusia bisa dikatakan sebagai sumber daya utama karena dapat mengolah menganalisis dan mengerjakan tujuan instansi secara efektif dan efisien. Peran manusia dalam instansi sebagai pegawai merupakan faktor penting dalam setiap instansi karena pegawai yang menjadi penggerak dan penentu jalannya organisasi.

Menurut Halim (2012) Akuntabilitas publik adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta kewajiban pertanggungjawaban dan keterangan.

Faktor terpenting dalam organisasi sektor publik adalah penilaian kinerja. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2017). Tujuan penilaian kinerja sektor publik adalah untuk membantu publik menilai melalui alat ukur finansial dan non finansial suatu strategi. *Value for money* merupakan pengukuran yang biasanya digunakan untuk mengukur akuntabilitas publik yang baik. Menurut Mardiasmo (2018) *value for money* adalah konsep pengukuran ekonomi, efektivitas dan efisien suatu kinerja pada organisasi, kegiatan ataupun program. Hasil penilaian kinerja pada instansi pemerintahan yang di ukur dengan *value for money* menghasilkan laporan yang biasanya di sebut dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP).

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) adalah bentuk pertanggungjawaban dalam menyajikan laporan dan mengungkapkan misi instansi dalam bentuk aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemangku kepentingan yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Selain itu, LAKIP juga merupakan media informasi tentang sejauh mana penentuan prinsip *good governance* termasuk penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar.

Tujuan adanya Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) adalah untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak pemberi amanat, pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah kepada unit kerja yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan dan perbaikan

dalam perencanaan khusus perencanaan jangka menengah dan pendek. Dengan disusunnya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) maka dapat meningkatkan akuntabilitas, kredibilitas instansi dimata instansi yang lebih tinggi dan akhirnya meningkat kepercayaan masyarakat. Selain itu juga dapat menjadikan instansi yang akuntabel sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.

Adanya Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan ini untuk mengukur kinerja yang seharusnya terjadi sesuai dengan yang diharapkan. Pengukuran dilakukan secara berkala tahunan. Kinerja diukur untuk melihat pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan atau program yang dirumuskan dalam perencanaan strategis. Tercapainya tujuan pengukuran kinerja ini dengan terwujudnya keselarasan antar tingkatan unit organisasi dan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat di ukur, dapat dicapai, relevan dan sesuai dengan kurun waktu yang ditentukan, Pengukuran kinerja dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada publik dan meningkatkan akuntabilitas.

Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau adalah salah satu instansi pemerintahan yang bertugas membantu Gubernur dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pangan, tanaman pangan dan hortikultura. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau setiap tahunnya membuat program dan kegiatan. Berikut anggaran dan realisasi untuk masing-masing program yang dilakukan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau pada tahun 2019 dan 2020.

Tabel 1.1
Laporan Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2019 dan 2020

No	Program	2019		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	6.784.041.662	5.017.155.172	73,96
2	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	784.050.000	149.234.198	19,03
3	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	110.000.000	90.240.000	82,04
4	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	200.000.000	125.908.000	62,95
5	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	200.000.000	173.281.400	86,64
6	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan	733.704.900	602.488.904	82,12
7	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	400.655.700	135.643.600	33,86
8	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.017.968.125	813.000.140	79,85
9	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.621.111.932	7.503.751.935	70,65
10	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	13.492.738.452	11.193.478.625	82,96
11	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	734.940.895	645.165.500	87,78
Jumlah		35.079.311.666	26.232.857.773	81,40
No	Program	2020		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.869.148.145	4.678.325.539	96,46
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	192.896.978	192.504.952	99,80

3	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	769.293.420	504.318.181	74,92
4	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu hasil Pertanian/Perkebunan	9.800.524.516	7.826.831.995	95,38
5	Program Pemberdayaan Penyuluhan	191.241.800	185.560.800	99,77
Jumlah		15.823.104.860	13.387.541.467	87,41

Sumber: Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, tahun 2019 dan 2020

Menurut laporan kinerja instansi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau periode 2019 dan 2020, realisasi pengeluaran keuangan masing-masing yang dilakukan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau dalam periode tersebut lebih kecil dari target yang dianggarkan. Pada tahun 2019 terdapat 11 program yang dijalankan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; Program Peningkatan Disiplin Aparatur; Program peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur; Program Peningkatan Pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Program peningkatan kesejahteraan petani ;Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan; Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan; Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan; Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan dan Program Pemberdayaan Penyuluhan. Pada tahun 2020, terdapat 5 program yang diselenggarakan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, yaitu Program Penyedia dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian; Program Peningkatan Produksi, Produksi Tanaman Pangan Melalui Produktivitas Mutu Hasil Tanaman Pangan;

Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura; Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan berkualitas dan Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian.

Tidak terdapat realisasi anggaran penuh pada tahun 2019 dan 2020. Program yang mencapai realisasi tertinggi pada tahun 2019 adalah pada program Pemberdayaan Penyuluhan dengan presentasi sebesar 87,78% dan di tahun 2020 pada Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan berkualitas dengan presentasi sebesar 99,52%. Sedangkan Program dengan realisasi anggaran terendah pada tahun 2019 adalah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan presentasi sebesar 19,03% dan di tahun 2020 pada Program Penyedia dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan presentasi sebesar 88,24%. Banyaknya program yang tidak mencapai target pada tahun 2019 dan 2020 menunjukkan bahwa anggaran Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau belum terserap dengan optimal.

Meskipun realisasi dari anggaran selama ini lebih kecil dari target anggaran belum menjamin bahwa pengeluaran tersebut sudah efektif dan efisien. Realisasi anggaran 2019 dan 2020 yang tidak mencapai target menunjukkan bahwa belum terserapnya anggaran dengan maksimal. Salah satu cara untuk mengukur apakah pengeluaran Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau telah ekonomis, efektif dan efisien adalah dengan menerapkan *value for money* pada pengukuran kinerja guna mengetahui apakah pengeluaran dapat digunakan sesuai dengan rencana kinerja yang telah dirancang. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan pengeluaran dengan sebaik-baiknya sehingga memberikan hasil yang maksimal.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Analisis *Value for Money* pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau pada tahun 2019 dan 2020 dengan menggunakan konsep *value for money* yang ditinjau dari segi ekonomis?
2. Bagaimana kinerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau pada tahun 2019 dan 2020 dengan menggunakan konsep *value for money* yang ditinjau dari segi efisien?
3. Bagaimana kinerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau pada tahun 2019 dan 2020 dengan menggunakan konsep *value for money* yang ditinjau dari segi efektifitas?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengukur kinerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau pada tahun 2019 dan 2020 dengan menggunakan konsep *value for money* yang ditinjau dari segi ekonomis
2. Untuk mengukur kinerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau pada tahun 2019 dan 2020 dengan menggunakan konsep

value for money yang ditinjau dari segi efisien

3. Untuk mengukur kinerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau pada tahun 2019 dan 2020 dengan menggunakan konsep *value for money* yang ditinjau dari segi efektivitas.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, selain untuk menambah wawasan dalam penerapan teori akuntansi yang telah dipelajari selama kuliah, penelitian ini juga penulis gunakan sebagai pemenuhan tugas akhir kuliah (skripsi)
2. Bagi instansi, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dan masukan dalam pengambilan keputusan bagi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.
3. Bagi peneliti lainnya, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi inspirasi untuk penelitian dengan kasus serupa.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan proposal ini penulis bagi menjadi beberapa bagian, sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian ini yang mana pada bab ini merupakan gambaran umum tentang apa saja yang akan dibahas dalam penelitian ini

BAB II: TELAHAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Pada bab ini merupakan penguraian telaah teori atau landasan teori yang digunakan serta memiliki relevansi dengan penulisan penelitian ini. Selanjutnya, berdasarkan telaah pustaka tersebut akan menimbulkan hipotesis yang dapat diujikan dalam penelitian ini

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjabarkan tentang desain penelitian, objek penelitian, definisi variabel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan penulis pada penelitian ini.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan gambaran umum dan hasil dari penelitian, serta penjelasan mengenai penelitian secara logis hasil penelitian yang telah dilakukan penulis.

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memaparkan kesimpulan dari permasalahan penelitian dan saran yang dianggap penting untuk penelitian selanjutnya ataupun untuk Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Organisasi Sektor Publik

Sektor publik seringkali dipahami sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau kepada publik yang dibayarkan melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum. Di setiap negara, cakupan organisasi sektor publik tidak sama. Tidak ada definisi yang secara komprehensif dan lengkap bisa digunakan untuk semua sistem pemerintahan. Di Indonesia, berbagai organisasi termasuk dalam cakupan sektor publik antara lain pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, sejumlah perusahaan dimana pemerintahan mempunyai saham (BUMN dan BUMD), organisasi bidang pendidikan, organisasi bidang kesehatan dan organisasi-organisasi massa (Mahsun, 2011).

Organisasi sektor publik bukan semata-mata organisasi sosial yang *non-profit oriented*. Banyak yang menganggap organisasi sektor publik pasti *non-profit*. Anggapan ini kurang tepat, karena organisasi sektor publik ada yang bertipe *quasi nonprofit*. *Quasi nonprofit* bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan motif surplus (laba) agar terjadi keberlangsungan organisasi dan memberikan kontribusi pendapatan negara atau daerah. Perlu ditegaskan bahwa organisasi sektor publik bukan hanya organisasi sosial, bukan hanya organisasi nonprofit dan juga bukan hanya organisasi pemerintahan (Mahsun,

2011). Organisasi sektor publik berbeda dengan organisasi swasta yang bertujuan memperoleh keuntungan atau laba, sedangkan organisasi sektor publik bertujuan memberikan pelayanan dan jasa untuk kepentingan publik.

2.1.2 Pengertian Kinerja

Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kinerja adalah suatu prestasi kerja atau hasil kerja seseorang berdasarkan kuantitas dan kualitas yang dicapainya dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diterima. Sebagaimana dikemukakan oleh Mangkunegara (2017) bahwa istilah kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang) yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Kinerja keuangan merupakan gambaran yang menjelaskan keadaan keuangan dalam suatu instansi atau perusahaan berdasarkan tujuan, standar, dan syarat yang sudah ditetapkan sebelumnya. Setiap instansi atau perusahaan memiliki standar maupun kriteria tersendiri untuk menentukan apakah kinerja tersebut berhasil atau tidak. Jika kinerja tersebut berhasil melampaui standar maupun kriteria yang ditentukan maka kinerja keuangan dalam suatu instansi atau perusahaan dapat dikatakan berhasil. Sedangkan jika kinerja keuangan dalam suatu instansi tidak berhasil mencapai standar yang sudah ditentukan maka perusahaan atau instansi tersebut telah gagal dalam mengupayakan kinerja

keuangannya. Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja adalah salah satu alat ukur yang dapat digunakan oleh organisasi dalam menilai apakah kinerja organisasi telah berjalan dengan baik dan semestinya.

2.1.3 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan- aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Hutabarat, 2021). Fahmi (2014) menyatakan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis untuk mengukur keberhasilan dan melihat sejauh mana kemampuan instansi dalam mengelola dan mengendalikan sumberdaya yang dimilikinya menggunakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja keuangan instansi pemerintahan dapat disebut juga sebagai hasil dari suatu sistem pengelolaan keuangan mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi dan strategi instansi pemerintahan yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Dengan kata lain, setelah suatu sistem pengelolaan keuangan terbentuk perlu disiapkan suatu alat untuk mengukur kinerja keuangan dan mengendalikan pemerintahan agar tidak terjasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(KKN), tidak adanya kepastian hukum dan stabilitas politik, dan ketidakjelasan arah dan kebijakan pembangunan.

Mardiasmo (2018) menyatakan, pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud yaitu:

1. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik.
2. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

2.1.4 Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala (Wahyuni dalam Kurniawati, 2020). Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggung-jawaban ataupun menanggapi serta menerangkan kinerja dan aksi seorang/ pimpinan sesuatu unit organisasi kepada pihak yang mempunyai hak ataupun yang berwenang memohon pertanggungjawaban (Lina dan Nur 2017). Akuntabilitas akan semakin baik jikalau didukung oleh sesuatu sistem akuntansi yang menciptakan data akurat,

profesional, tepat waktu dan bisa dipertanggungjawabkan. Sejalan dengan perihal tersebut, akuntabilitas publik merupakan kewajiban agen (pemerintah) mengelola sumber daya, melaporkan serta mengungkapkan seluruh kegiatan serta aktivitas yang berkaitan dengan sumber daya publik kepada pemberi mandat(prinsipal).

Kata kunci dari akuntabilitas adalah adanya bentuk “mempercayakan suatu tugas (*the entrusting a duty*) yang mengharuskan adanya akuntabilitas. Atau dengan kata lain muncul adanya unsur pendelegasian (*delegated relationship*) dari satu pihak kepada pihak lain. Tanpa adanya unsur pendelegasian atau mempercayakan tugas maka terminologi akuntabilitas tidak lagi menjadi relevan. Pandangan berbasis pendelegasian (*delegation based view*) ini berbeda dengan konsep lain yang melatarbelakangi munculnya akuntabilitas pada suatu institusi misalnya pandangan filosofi moral (*moral philoposhy*) atau hubungan pelaksanaan (*executory relationship*). (Ihda, 2017)

2.1.5 Value for money

Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa *value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisien dan efektivitas. Ruang lingkup ekonomi meliputi pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu dengan harga yang terendah. Efisien menyangkut pencapaian yang maksimum dengan input tertentu.

Efektivitas berkaitan erat terhadap tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah di tetapkan. Dalam hal ini tujuan yang di inginkan oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *value for*

money yaitu : ekonomis (hemat cermat) dalam penggunaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, dan efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Elemen-elemen tersebut merupakan tiga elemen pokok *value for money* , beberapa pihak berpendapat bahwa tiga elemen saja belum cukup sehingga perlu ditambahkan dengan dua elemen lain yaitu keadilan (*equity*) dan kesetaraan (*equality*). (Mardiasmo, 2018)

Mardiasmo (2018) juga membagi indikator *value for money* menjadi dua, yaitu:

1. Indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi)

Ekonomi artinya pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik (*spending less*). Tujuan *value for money* pada elemen ekonomi adalah hemat dan cermat dalam pengadaan kegiatan dan alokasi sumber daya yang ada di balitnak.

2. Indikator kualitas pelayanan (efektivitas)

Efektivitas artinya kontribusi output terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Indikator kinerja sering disamakan dengan ukuran kinerja (*performance measure*). Akan tetapi, keduanya merupakan kriteria pengukuran kinerja dan terdapat perbedaan makna. Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja, sehingga bentuknya cenderung kualitatif. Sedangkan ukuran kinerja adalah kriteria kinerja yang mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sehingga bentuknya lebih

bersifat kuantitatif. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi.

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian sebagai perwujudan *Good Governance* dan kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu LAKIP merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi, sebagaimana yang dijabarkan dalam tugas atau sasaran strategis, yang mengacu pada Perencanaan Strategik (Restra), Rencana Kerja Pemerintah (Renja/RKP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RKTm).

Penelitian yang dilakukan Purwiyanti (2017) dengan judul “Analisis Kinerja Berbasis Konsep *Value For Money* pada Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggola Kodi (Studi di Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu)”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kinerja kegiatan fisik Pekerjaan Irifasi Donggola Kodi tahun 2014 berjalan secara ekonomis, efektif dan efisien dengan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja kegiatan fisik Pekerjaan Irigasi Donggola Kodi tahun 2014 telah mampu menjalankan pekerjaan secara ekonomus, efektif dan efisien.

Rahayu (2018) dengan judul Penerapan Konsep *Value For Money* dalam Menilai Kinerja Pelayanan Sektor Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang Pinrang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif dan kuantitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kinerja pelayanan Rumah Sakit Umum Daera Lasinrang jika

diukur melalui pendekatan *Value For Money* yaitu ekonomis, efektif dan efisien. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan *Value For Money* pada kinerja pelayanan sektor publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang Pinrang dinilai cukup baik karena telah memenuhi unsur *value for money* dilihat dari tiga aspek yaitu ekonomis efisien dan efektivitas.

Husna (2020) dengan judul penelitian Analisis *Value For Money* dalam Pengukuran Kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Periode 2017-2018 dengan metode penelitian kuantitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa kinerja keuangan menggunakan konsep analisis *Value For Money* pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh periode tahun 2017-2018 ditinjau dari segi ekonomis, efektif dan efisien. Hasil penelitian analisis dengan metode *Value For Money* kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh pada tahun 2017-2018 mencapai nilai rata-rata cukup dari segi ekonomis, efektif dan efisien.

2.2 Hipotesis

Berdasarkan Telaah pustaka diatas, peneliti menarik hipotesis sebagai berikut:

H1: Kinerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Riau pada tahun 2019 dan 2020 belum memenuhi konsep *value for money* yang ditinjau dari segi ekonomis

H2: Kinerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Riau pada tahun 2019 dan 2020 belum memenuhi konsep *value for money* yang

ditinjau dari segi efisien

H3: Kinerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Riau pada tahun 2019 dan 2020 belum memenuhi konsep *value for money* yang ditinjau dari segi efektivitas.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau dengan menggunakan desain penelitian metode kualitatif. Peneliti menggunakan metode ini untuk mengetahui sistem kinerja keuangan pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau dan menilai apakah kinerja keuangan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau sudah ekonomis, efektif dan efisien.

3.2 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau yang beralamatkan di Jalan HR. Soebrantas No.4, Delima, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau.

3.3 Definisi Variabel Penelitian

3.3.1 Value For Money

Metode untuk mengukur kinerja keuangan pada instansi atau perusahaan ini adalah dengan *Value For Money*. Ada 3 elemen dalam *value for money* : Ekonomis, Efektivitas dan Efisien. Berikut cara mengukur kinerja keuangan metode *value for money*.

1. Ekonomis

Ekonomis berkaitan dengan penggunaan *input* primer berupa anggaran atau kas menjadi *input* sekunder berupa tenaga kerja, baham,

infrastruktur dan barang modal yang dikonsumsi untuk pelaksanaan kegiatan operasi organisasi. Konsep ekonomi terkait dengan penghematan anggaran untuk memperoleh input. Konsep ekonomi menghendaki organisasi sektor publik tidak melakukan pemborosan anggaran dalam pelaksanaan program, kegiatan dan operasional organisasi. Ekonomi memiliki pengertian bahwa sumber daya *input* hendaknya diperoleh secara hemat yaitu dengan harga yang lebih rendah (*spending less*) atau lebih murah dengan kualitas tertentu. Kehematan harga biasanya diukur dengan harga pasar. Ekonomi merupakan perbandingan antara input dengan nilai rupiah (anggaran). (Mahmudi, 2011)

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Input}}{\text{Anggaran (Rp)}} \times 100\%$$

Menurut Mahsun (2013), kriteria ekonomis adalah

- a. Jika diperoleh nilai perbandingan kurang dari 100% maka, ekonomis.
- b. Jika diperoleh nilai perbandingan sama dengan 100% maka, ekonomis berimbang
- c. Jika diperoleh nilai perbandingan lebih dari 100% maka, tidak ekonomis

2. Efisien

Efisien merupakan hubungan antara *output* berupa barang atau jasa yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan *output* tersebut. Secara matematis, efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dengan *input* atau dengan istilah lain *output* per unit *input*. Konsep

efisiensi hampir sama dengan produktivitas. Jika efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input, maka produktivitas merupakan perbandingan antara *input* dengan *output*. Suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah-rendahnya, atau dengan *input* tertentu yang mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya. Efisiensi berarti pembelanjaan anggaran secara cermat (*spending well*). (Mahmudi, 2011)

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

Menurut Mahsun (2013), kriteria efisien adalah :

- a. Jika diperoleh nilai perbandingan kurang dari 100% maka, tidak efisien
- b. Jika diperoleh nilai perbandingan sama dengan 100 maka, efisien berimbang
- c. Jika diperoleh nilai perbandingan lebih dari 100% maka, efisien

3. Efektivitas

Efektivitas merupakan perbandingan antara hasil yang diharapkan (target) dengan hasil yang sesungguhnya di capai. Hasil atau target yang diharapkan merupakan *outcome* sedangkan hasil yang di capai merupakan *output*. Efektivitas membandingkan antara *outcome* dengan *output*. Ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi pada *output* atau proses, sedangkan efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa

memenuhi tujuan yang diharapkan, atau dengan kata lain anggaran digunakan secara tepat (*spending wisely*). (Mahmudi, 2011)

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Menurut Mahsun (2013), kriteria efektivitas adalah

- a. Jika diperoleh nilai perbandingan kurang dari 100% maka, tidak efektif
- b. Jika diperoleh nilai perbandingan sama dengan 100% maka, efektivitas berimbang
- c. Jika diperoleh nilai perbandingan lebih dari 100% maka, efektif.

Value for money menghendaki organisasi sektor publik dapat memenuhi prinsip ekonomi, efisien dan efektivitas tersebut secara bersama-sama yang berarti mampu menggunakan uang publik (anggaran) secara hemat, cermat dan tepat untuk mencapai target, sasaran dan tujuan. (Mahmudi, 2011)

Input adalah semua jenis sumber daya masukan yang digunakan dalam suatu proses tertentu untuk menghasilkan *output*. *Input* tersebut dapat berupa bahan baku untuk proses, orang (tenaga, keahlian, dan keterampilan), infrastruktur seperti gedung dan peralatan, teknologi (*hardware* dan *software*). *Input* menjadi dua, yaitu *Input* Primer dan *input* sekunder. *Input* primer adalah kas, sedangkan *input* sekunder adalah bahan baku, orang, infrastuktur, dan masukan lainnya yang digunakan untuk proses menghasilkan *output* (Mahmudi, 2015). Pengukuran input adalah pengukuran sumber daya yang dikonsumsi oleh suatu proses dalam rangka menghasilkan *output*. Proses tersebut dapat berbentuk program atau aktivitas.

Ukuran input mengindikasikan jumlah sumber daya yang dikonsumsi untuk suatu program, aktivitas, atau organisasi (Mahmudi, 2015).

Output adalah hasil langsung dari suatu proses. Pengukuran *output* adalah pengukuran keluaran langsung suatu proses. Ukuran *output* menunjukkan hasil implementasi program atau aktivitas. Pengukuran *output* berbentuk kuantitatif keuangan atau kuantitatif non keuangan (Mahmudi, 2015).

Konsep *outcome* lebih sulit dibandingkan *input* dan *output*. *Outcome* mengukur apa yang telah dicapai. Dengan kata lain *outcome* adalah hasil yang dicapai dari suatu program atau aktivitas dibandingkan dengan hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan bisa berupa target kinerja yang diharapkan, sedangkan *outcome* adalah hasil nyata yang dicapai (Mahmudi, 2015). Tujuan pengukuran *outcome* adalah untuk mengukur nilai dari suatu aktivitas atau program. Jika pengukuran *output* lebih bersifat mengukur kuantitas barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu aktivitas, maka pengukuran *outcome* mengukur nilai kualitas dari *output* tersebut. Kualitas *output* dalam arti yang lebih luas adalah dampak terhadap masyarakat. Dampak demikian pengukuran *outcome* adalah pengukuran dampak sosial suatu aktivitas (Mahmudi, 2015).

3.3.2 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah suatu analisis untuk mengukur keberhasilan dan melihat sejauh mana kemampuan instansi dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya menggunakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

3.4 Jenis dan Sumber data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dengan sumber data primer dimana data diperoleh langsung dari subjeknya untuk diteliti lebih lanjut pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Riau tahun 2019 dan 2020.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data analisis dokumen yaitu dengan mencari dan mengumpulkan segala informasi yang dibutuhkan dari sumber data tertulis, buku-buku, penelitian terdahulu dan literatur lainnya. Laporan yang diolah adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Riau 2019 dan 2020.

3.6 Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif dimana penulis melakukan pengukuran kinerja keuangan dengan metode *value for money* yang memiliki 3 elemen yaitu ekonomis, efektif dan efisien. Peneliti akan menjelaskan perhitungan pengukuran ini dan menganalisisnya guna untuk mengetahui dan melihat apakah kinerja keuangan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Riau sudah baik atau belum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau berada di salah satu Kecamatan di Pekanbaru, tepatnya beralamatkan di Jalan HR. Soebrantas No.4, Delima, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau. 28289.

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau mulanya bernama Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang di bentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 Tahun 1977 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 1980, Tangan 5 Desember 2008 sesuai Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2008 berubah menjadi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau. Tanggal 2 Januari 2014 Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Riau Nomor. 10 Tahun 2014 Berubah Menjadi Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau, hasil peleburan dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau yang ditetapkan pada tanggal 4 November 2016 dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 86 Tahun 2016 tentang hasil peleburan dari Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perkebunan dan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Riau. Maka berubah menjadi Dinas Tanamann Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau. Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau No. 64 Tahun 2019, tanggal 27 Desember

2019, Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Maka Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan berubah menjadi Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.

Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau memiliki visi, yaitu “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia”. Makna yang terkandung dalam visi tersebut, Berdaya Saing yaitu kondisi kemampuan daerah yang mapan didukung pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang handal. Sejahtera yaitu Kondisi kemakmuran masyarakat Riau yang dicirikan dengan meningkatnya pendapat masyarakat, berkurangnya ketimpangan sosial, menurunnya kemiskinan dan pengangguran. Bermartabat yaitu pengalaman nilai-nilai agama serta penerapan falsafah budaya melayu dalam sendi kehidupan bermasyarakat. Unggul yaitu menjadikan Riau berprestasi di bidang keagamaan, budaya, seni, dan olahraga serta terbaik dan terdepan dalam inovasi pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah.

Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau memiliki misi “Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing”.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Riau, Dinas Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Kemudian

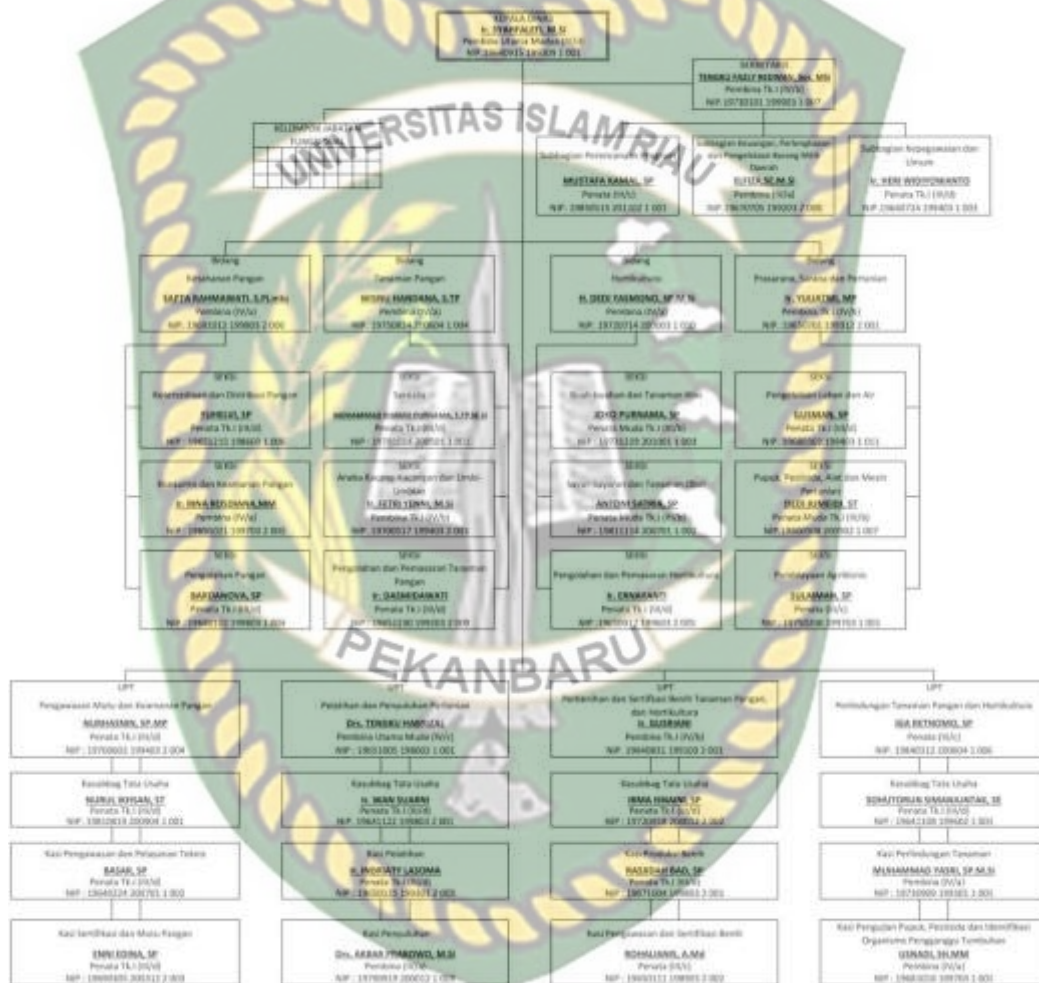
sesuai Peraturan Gubernur Riau Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau memiliki Tugas Pokok “Membantu Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura”.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau mempunyai fungsi sebagai berikut: Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Tanaman Pangan, Bidang Hortikultura, dan Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;

1. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Tanaman Pangan, Bidang Hortikultura dan dan Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Hortikultura dan dan Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
3. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Hortikultura dan dan Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berikut adalah struktur organisasi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau



Sumber: <http://distanhor.riau.go.id/profil>

Susunan organisasi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau terdiri atas Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Sekretariat, Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Tanaman Pangan, Bidang Hortikultura, Bidang Prasarana, sarana dan pertanian, UPT Pengawasan

Mutu dan Keamanan Pangan, UPT Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian, UPT Perbenihan dan Sertifikat Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Sekretariat Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau terdiri atas Subbagian Perencanaan Program; Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Subbagian Kepegawaian dan Umum. Bidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau terdiri atas Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan; Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan dan Seksi Pengolahan Pangan. Bidang Tanaman Pangan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau terdiri atas Seksi Serealia; Seksi Aneka Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian; Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan.

Pada Bidang Hortikultura Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau terdiri dari Seksi Buah-buahan dan Tanaman Hias; Seksi Sayur-sayuran dan Tanaman Obat dan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura. Bidang Prasarana, sarana dan Pertanian terdiri atas Seksi Pengolahan Lahan dan Air; Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian dan Seksi Pembiayaan Agribisnis. UPT Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan terdiri dari Kepala UPT; Subbagian Tata Usaha; Seksi Pengawasan dan Pelayanan Teknis dan Seksi Sertifikat dan Mutu Pangan.

UPT Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau terdiri atas Kepala UPT, Subbagian Tata Usaha, Seksi Pelatihan dan Seksi Penyuluhan. UPT Perbenihan dan Sertifikat

Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas Kepala UPT, Subbagian Tata Usaha, Seksi Produksi Benih dan Seksi Pengawasan dan Sertifikat Benih. Terakhir pada UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas Kepala UPT, Subbagian Tata Usaha, Seksi Perlindungan Tanaman dan Seksi Pengujian Pupuk, Pestisidan dan Identifikasi Organisme Pengganggu Tanaman.

4.2 Hasil Perhitungan *Value For Money* Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2019 Dan 2020

Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau setiap tahunnya memiliki program yang harus dilaksanakan. Setiap program yang dilaksanakan membutuhkan anggaran untuk kegiatan tersebut. Pertanggungjawaban kegiatan ini ditulis dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau. Didalam LKJIP Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau tahun 2019 terdapat 11 program yang dilaksanakan, berikut nama program dan kegiatannya.

Tabel 4.1
Indikator Kinerja Program SKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau 2019

No	Program	Kegiatan
1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Peyampaian Opd Dan Ppkd
		2. Penyusunan Rencana Kerja Skpd
		3. Penyusunan Rencana Strategis Skpd
2	Program Peningkatan Produksi	4. Penumbuhan Dan Pengembangan Kawasan Produksi Padi

No	Program	Kegiatan
	Pertanian/Perkebunan	5. Penumbuhan Dan Pengembangan Kawasan Produksi Jagung
		6. Penumbuhan Dan Pengembangan Kawasan Produksi Buah-Buahan Dan Tanaman Hias
		7. Penumbuhan Dan Pengembangan Kawasan Produksi Sayur-Sayuran Dan Tanaman Obat-Obatan
		8. Penyediaan Alat Mekanisasi Perkebunan
		9. Pembinaan Dan Pemantauan Pupuk Dan Pestisida Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
		10. Rehabilitas Jalan Produksi
		11. Normalisasi Saluran Drainase Pada Areal Perkebunan Rakyat
		12. Perluasan Areal Dan Pengelolaan Lahan Tanaman Pangan Dan Hortikultura
		13. Pengembangan Water Management Di Kawasan Perkebunan
		14. Pengembangan Dan Perbaikan Jaringan Irigasi Tanaman Pangan Dan Hortikultura
		15. Peremajaan Kebun Karet Rakyat
		16. Peremajaan Kebut Kelapa Rakyat
		17. Pembinaan Usaha Perkebunan
		18. Penerbitan Izin Usaha Perkebunan
		19. Pemantauan Dan Pengemgdalian Kebakaran Lahan Dan Kebun
		20. Penyediaan Bibit Kelapa Sawit, Karet Dan Kakao
		21. Penumbuhan Dan Pengembangan Kawasan Produksi Aneka Kacang Dan Umbi-Umbian
		22. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (Opt) Perkebunan
		23. Sekolah Lapangan Pengendalian Hama

No	Program	Kegiatan
		Terpadu (SI-Pht) Perkebunan
		24. Pembinaan Petugas Hama Penyakit Dan Cadangan Pestisida Untuk Penanganan Darurat
		25. Pembinaan, Pengawasan, Monitoring Serta Pengendalian Serangan Hama Dan Penyakit Tph
		26. Peningkatan Kapasitas Brigade Proteksi Tanaman, Cadangan Pestsida Dan Pembinaan Kelembagaan Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura
		27. Pengujian Dan Pengawasan Pupuk, Pestisida Dan Hama Penyakit Tanaman Pangan Dan Hortikultura
		28. Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura
		29. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
		30. Pengolahan Dan Pemutakhiran Data Statistik Serta Penyusunan Profil Perkebunan
		31. Penyusunan Data Base Potensi Produksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura
3	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	32. Pembinaan Dan Pengadaan Alat Pasca Panen Tanaman Pangan
		33. Pembinaan Dan Pengadaan Alat Pasca Panen Hortikultura
		34. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Alat Mesin Pertanian Serta Pembinaan Kelembagaan Upja Tanaman Pangan Dan Hortikultura
		35. Rekayasa Teknologi Mekanisasi Pertanian
		36. Dem-Farm Pengembang Komoditi Lada (Pemeliharaan)
		37. Pemeliharaan Kebun Koleksi Tanaman Perkebunan

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

No	Program	Kegiatan
		38. Dem-Farm Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Kebun
		39. Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan
		40. Pengembangan Perbenihan Tanaman Hortikultura
		41. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Upt. Balai Pelatihan Penyuluh Pertanian
		42. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Upt. Balai Proteksi Tanaman Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura
		43. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Upt. Balai Proteksi Tanaman Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura (Dak)
		44. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Upt. Perbenihan Dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
		45. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Upt Perbenihan Dan Sertifikasi Benih Tph Dan Perkebunan (Dak)
		46. Pengawasan Peredaran Dan Sertifikasi Benih Perkebunan
		47. Penilaian Kultivar Dan Pengujian Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura
4	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	48. Pembinaan Mutu Hasil Produk Perkebunan
		49. Penyediaan Alat Pengolahan Hasil Perkebunan
		50. Pembinaan Sistem Pembiayaan, Manajemen, Usaha Dan Kemitraan Usaha
5	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	51. Pembinaan Dan Pengawasan Program Pembiayaan Usaha Perkebunan Untuk Program Peremajaan
		52. Pengawasan Pengembalian Kredit Petani
		53. Pelatihan Petani Dan Aparatur Perkebunan

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

No	Program	Kegiatan
		54. Peningkatan Sdm Petani, Petugas Dan Pelaku Agribisnis Tanaman Pangan Dan Hortikultura
		55. Pengembangan Kelembagaan Diklat
		56. Pengembangan Inkubator Usaha Tani
6	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan	57. Mimbar Sarasehan Ktna Se-Provinsi Riau
		58. Penilaian Tenaga Penyuluhan Pertanian
		59. Penyusunan Program Penyuluhan Tingkat Provinsi
		60. Penyelenggaraan Demfarm Padi Sawah
		61. Pekan Daerah Ktna Dan Penyuluhan Swakarsa
7	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	62. Pembangunan Kebun Sagu Rakyat
8	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	63. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
		64. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
		65. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		66. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
		67. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
		68. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
		69. Penyediaan Alat Tulis Kantor

No	Program	Kegiatan
		70. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		71. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		72. Penyediaan Makanan dan Minuman
		73. Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi Dan Kehumasan Skpd
		74. Penyediaan Administrasi Kepegawaian
		75. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		76. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (K2)
		77. Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
		78. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
		79. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
9	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80. Pendidikan Dana Pelatihan Formal
		81. Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional
		82. Pendidikan Dan Pelatihan Non Formal
10	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	83. Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur
11	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	84. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
		85. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

No	Program	Kegiatan
		86. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
		87. Penyediaan Sarana Kearsipan

Sumber : LKJIP Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2019

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan memiliki 3 kegiatan, Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan memiliki 27 kegiatan, Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan memiliki 17 kegiatan, Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan memiliki 3 kegiatan, Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 6 kegiatan, Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan memiliki 5 kegiatan, Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan memiliki 1 kegiatan, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran memiliki 17 kegiatan, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur memiliki 3 program, Program Peningkatan Disiplin Aparatur memiliki 1 kegiatan dan Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur memiliki 4 kegiatan.

Pada tahun 2020 Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau memiliki 5 program yang dijalankan, berikut nama program yang dilaksanakan.

Tabel 4.2
Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Belanja Langsung Dinas Pangan,
Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau S/D Desember 2020

NO	PROGRAM	Kegiatan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
		2 Pengelolaan Barang Milik Daerah Opd
		3 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		4 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
		6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor
		7 Penyediaan Makan Dan Minuman
		8 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor
		9 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
		10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
		11 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
		12 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
		13 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	14 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Operasional
		15 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
		16 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan
		17 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
		18 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
19 Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan		
3	Program Peningkatan	20 Promosi Dan Edukasi Pangan Lokal

NO	PROGRAM	Kegiatan
	Ketahanan Pangan	21 Diversifikasi Produk Pangan Lokal 22 Peningkatan Pengendalian Kerentanan Pangan 23 Pengelolaan Sistem Kewaspadaan Pangan Dan Gizi 24 Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan 25 Analisi Situasi Konsumsi Pangan Penduduk 26 Analisis Ketersediaan Pangan 27 Penanganan Daerah Rawan Pangan Kronis 28 Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Kab/Kota 29 Sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) 30 Pengembangan Ketersediaan Pangan Lokal 31 Jaringan Distribusi Dan Pasokan Pangan 32 Penguata Cadangan Pangan Pemerintahan Daerah Riau 33 Penyusunan Rancangan Penetapan Harga Minimum Pangan Lokal
4	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Pertanian	34 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Upt. Balai Pelatihan Penyuluh Pertanian 35 Pengandaian Opt Tanaman Pangan Hortikultura 36 Perluasan Areal Tanaman Pangan Melalui Rehabilitasi Sawah Terlantar 37 Pengembangan Dan Perbaikan Irigasi Tersier 38 Pengembangan Sumber Air Pertanian Melalui Irigasi Perpompaan

NO	PROGRAM	Kegiatan
		39 Pembangunan Jalan Pertanian
		40 Peningkatan Ekstensifikasi Tanaman Serealia
		41 Intensifikasi Tanaman Serealia
		42 Pengembangan Tanaman Sayuran Dan Biofarmaka
		43 Pembinaan Dan Pengadaan Alat Pasca Panen Dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
		44 Pengembangan Kawasan Produksi Buah-Buahan Dan Tanaman Hias
		45 Intensifikasi Tanaman Hortikultura
		46 Peningkatan Ekstensifikasi Tanaman Aneka Kacang-Kacangan Dan Umbi-Umbian (Akabi)
		47 Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan, Hortikultura
		48 Penumbuhan Dan Pengembangan Penangkar Bibit/Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura
		49 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Upt Perbenihan Dan Sertifikasi Benih Tph Dan Perkebunan (Dak)
		50 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Upt Perbenihan Dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
		51 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Upt. Balai Proteksi Tph Bun
		52 Pembinaan Dan Pengadaan Alat Pasca Panen Dan Pngolahan Hasil Hortikultura

NO	PROGRAM	Kegiatan
		53 Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura
		54 Penilaian Kultivar Dan Pengujian Benih Tanaman Pangan Hortikultura
5	Program Pemberdayaan Penyuluhan	55 Pelatihan Petani Dan Petugas Tanaman Pangan Hortikultura
		56 Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian
		57 Pekan Nasional Ktna

Sumber : LKJIP Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2020

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran memiliki 13 kegiatan, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apatur memiliki 6 kegiatan, Program Peningkatan Ketahanan Pangan memiliki 14 kegiatan, Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian memiliki 21 kegiatan dan program pemberdaya penyuluhan memiliki 3 kegiatan pada tahun 2020.

Untuk mengukur kinerja keuangan pada instansi atau perusahaan ini adalah dengan Metode *Value For Money*. Ada 3 elemen dalam *value for money* : Ekonomis, Efisien dan Efektivitas. Berikut cara mengukur tingkat Ekonomis menurut Mahsun (2013).

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Input}}{\text{Anggaran (Rp)}} \times 100\%$$

Nilai input merupakan realisasi anggaran dan Anggaran (Rp) merupakan anggaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau. Berikut perhitungan elemen ekonomis pada setiap program yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau tahun 2019.

Tabel 4.3
Hasil Perhitungan Ekonomis Program Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau tahun 2019

No	Program	Kegiatan	anggaran (Rp)	realisasi (Rp)	ekonomis (%)
1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Peyampaian Opd Dan Ppkd	100.000.000	99.446.400	99,45
		2. Penyusunan Rencana Kerja Skpd	50.000.000	39.080.000	78,16
		3. Penyusunan Rencana Strategis Skpd	50.000.000	34.755.000	69,51
2	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	4. Penumbuhan Dan Pengembangan Kawasan Produksi Padi	2.370.186.000	2.240.491.267	94,53
		5. Penumbuhan Dan Pengembangan Kawasan Produksi Jagung	393.549.000	351.054.050	89,20
		6. Penumbuhan Dan Pengembangan Kawasan Produksi Buah-Buahan Dan Tanaman Hias	1.014.707.350	963.869.745	94,99

No	Program	Kegiatan	anggaran (Rp)	realisasi (Rp)	ekonomis (%)
		7. Penumbuhan Dan Pengembangan Kawasan Produksi Sayur-Sayuran Dan Tanaman Obat-Obatan	620.997.350	557.099.200	89,71
		8. Penyediaan Alat Mekanisasi Perkebunan	537.561.525	293.869.745	54,67
		9. Pembinaan Dan Pemantauan Pupuk Dan Pestisida Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	83.692.675	74.186.100	88,64
		10. Rehabilitas Jalan Produksi	1.552.405.000	1.356.555.700	87,38
		11. Normalisasi Saluran Drainase Pada Areal Perkebunan Rakyat	1.136.210.000	754.382.818	66,39
		12. Perluasan Areal Dan Pengelolaan Lahan Tanaman Pangan Dan Hortikultura	795.995.000	716.883.100	90,06
		13. Pengembangan Water Management Di Kawasan Perkebunan	460.338.500	446.705.000	97,04
		14. Pengembangan Dan Perbaikan Jaringan Irigasi Tanaman Pangan	225.526.250	215.347.000	95,49

No	Program	Kegiatan	anggaran (Rp)	realisasi (Rp)	ekonomis (%)
		Dan Hortikultura			
		15. Peremajaan Kebun Karet Rakyat	485.065.425	351.267.745	72,42
		16. Peremajaan Kebun Kelapa Rakyat	557.416.900	414.356.441	74,34
		17. Pembinaan Usaha Perkebunan	90.308.375	76.899.300	85,15
		18. Penerbitan Izin Usaha Perkebunan	538.200.000	276.289.800	51,34
		19. Pemantauan Dan Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Kebun	90.920.515	77.360.436	85,09
		20. Penyediaan Bibit Kelapa Sawit, Karet Dan Kakao	475.343.220	396.959.850	83,51
		21. Penumbuhan Dan Pengembangan Kawasan Produksi Aneka Kacang Dan Umbi-Umbian	390.668.617	364.767.892	93,37
		22. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (Opt) Perkebunan	91.745.438	83.688.920	91,22
		23. Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (Sl-Pht)	98.366.500	96.076.500	97,67

No	Program	Kegiatan	anggaran (Rp)	realisasi (Rp)	ekonomis (%)
		Perkebunan			
		24. Pembinaan Petugas Hama Penyakit Dan Cadangan Pesticida Untuk Penanganan Darurat	116.887.800	109.131.600	93,36
		25. Pembinaan, Pengawasan, Monitoring Serta Pengendalian Serangan Hama Dan Penyakit Tph	176.641.425	167.619.400	94,89
		26. Peningkatan Kapasitas Brigade Proteksi Tanaman, Cadangan Pesticida Dan Pembinaan Kelembagaan Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura	97.919.500	95.762.000	97,80
		27. Pengujian Dan Pengawasan Pupuk, Pesticida Dan Hama Penyakit Tanaman Pangan Dan Hortikultura	151.409.568	141.251.500	93,29
		28. Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura	91.282.375	79.090.000	86,64
		29. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	330.561.904	153.840.960	46,54

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

No	Program	Kegiatan	anggaran (Rp)	realisasi (Rp)	ekonomis (%)
		30. Pengolahan Dan Pemutakhiran Data Statistik Serta Penyusunan Profil Perkebunan	231.061.940	118.545.100	51,30
		31. Penyusunan Data Base Potensi Produksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura	287.770.300	220.014.300	76,45
3	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	32. Pembinaan Dan Pengadaan Alat Pasca Panen Tanaman Pangan	860.298.775	851.392.200	98,96
		33. Pembinaan Dan Pengadaan Alat Pasca Panen Hortikultura	344.728.872	276.849.147	80,31
		34. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Alat Mesin Pertanian Serta Pembinaan Kelembagaan Upja Tanaman Pangan Dan Hortikultura	465.343.000	199.183.700	42,80
		35. Rekayasa Teknologi Mekanisasi Pertanian	174.605.875	138.635.300	79,40
		36. Dem-Farm Pengembang Komoditi Lada (Pemeliharaan)	106.012.125	98.553.500	92,96
		37. Pemeliharaan Kebun Koleksi Tanaman Perkebunan	114.565.500	108.530.000	94,73

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

No	Program	Kegiatan	anggaran (Rp)	realisasi (Rp)	ekonomis (%)
		38. Dem-Farm Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Kebun	117.327.750	24.133.000	20,57
		39. Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan	1.016.813.325	973.845.325	95,77
		40. Pengembangan Perbenihan Tanaman Hortikultura	456.778.375	432.894.200	94,77
		41. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Upt. Balai Pelatihan Penyuluh Pertanian	250.360.000	250.334.900	99,99
		42. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Upt. Balai Proteksi Tanaman Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura	263.000.000	254.424.789	96,74
		43. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Upt. Balai Proteksi Tanaman Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura (Dak)	633.928.570	366.071.806	57,75
		44. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Upt. Perbenihan Dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan,	531.286.500	423.707.500	79,75

No	Program	Kegiatan	anggaran (Rp)	realisasi (Rp)	ekonomis (%)
		Hortikultura Dan Perkebunan			
		45. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Upt Perbenihan Dan Sertifikasi Benih Tph Dan Perkebunan (Dak)	5.076.785.715	2.920.642.258	57,53
		46. Pengawasan Peredaran Dan Sertifikasi Benih Perkebunan	96.211.075	82.444.500	85,69
		47. Penilaian Kultivar Dan Pengujian Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura	113.066.475	102.109.800	90,31
		48. Pembinaan Mutu Hasil Produk Perkebunan	312.732.750	284.707.640	91,04
4	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	49. Penyediaan Alat Pengolahan Hasil Perkebunan	589.933.500	454.937.500	77,12
		50. Pembinaan Sistem Pembiayaan, Manajemen, Usaha Dan Kemitraan Usaha	115.301.875	73.355.000	63,62
5	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	51. Pembinaan Dan Pengawasan Program Pembiayaan Usaha Perkebunan Untuk Program Peremajaan	116.023.700	73.766.704	63,58

No	Program	Kegiatan	anggaran (Rp)	realisasi (Rp)	ekonomis (%)
		52. Pengawasan Pengembalian Kredit Petani	66.863.325	57.587.500	86,13
		53. Pelatihan Petani Dan Aparatur Perkebunan	267.713.250	254.645.000	95,12
		54. Peningkatan Sdm Petani, Petugas Dan Pelaku Agribisnis Tanaman Pangan Dan Hortikultura	137.693.725	131.714.700	95,66
		55. Pengembangan Kelembagaan Diklat	60.635.900	-	-
		56. Pengembangan Inkubator Usaha Tani	84.775.000	84.775.000	100,00
6	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan	57. Mimbar Sarasehan Ktna Se-Provinsi Riau	90.335.070	64.761.900	71,69
		58. Penilaian Tenaga Penyuluhan Pertanian	164.983.075	152.861.800	92,65
		59. Penyusunan Program Penyuluhan Tingkat Provinsi	48.120.500	47.713.400	99,15
		60. Penyelenggaraan Demfarm Padi Sawah	189.713.000	177.145.000	93,38
		61. Pekan Daerah Ktna Dan Penyuluhan Swakarsa	241.789.250	202.683.400	83,83

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

No	Program	Kegiatan	anggaran (Rp)	realisasi (Rp)	ekonomis (%)
7	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	62. Pembangunan Kebun Sagu Rakyat	400.655.700	135.643.600	33,86
8	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	63. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	2.420.000.000	1.486.966.973	61,44
		64. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	750.000.000	475.360.000	63,38
		65. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000	96.335.000	96,34
		66. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	750.000.000	650.556.000	86,74
		67. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	116.100.000	-	-
		68. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	150.000.000	133.810.500	89,21
		69. Penyediaan Alat Tulis Kantor	120.000.000	95.260.000	79,38
		70. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	120.000.000	101.765.200	84,80
		71. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-
		72. Penyediaan Makanan Dan Minuman	345.000.000	289.320.000	83,86

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

No	Program	Kegiatan	anggaran (Rp)	realisasi (Rp)	ekonomis (%)
		73. Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi Dan Kehumasan Skpd	150.000.000	114.579.000	76,39
		74. Penyediaan Administrasi Kepegawaian	50.000.000	46.505.700	93,01
		75. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	62.000.000	21.730.000	35,05
		76. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (K2)	420.000.000	420.000.000	100,00
		77. Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	141.500.000	115.379.500	81,54
		78. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	220.000.000	138.943.460	63,16
		79. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	869.441.662	821.643.839	94,50
9	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80. Pendidikan Dana Pelatihan Formal	85.000.000	46.250.000	54,41
		81. Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	60.000.000	57.143.600	95,24
		82. Pendidikan Dan Pelatihan Non Formal	55.000.000	22.514.400	40,94
10	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	83. Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur	110.000.000	90.240.000	82,04

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

No	Program	Kegiatan	anggaran (Rp)	realisasi (Rp)	ekonomis (%)
11	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	84. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	394.850.000	-	-
		85. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	120.000.000	-	-
		86. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	200.000.000	140.984.198	70,49
		87. Penyediaan Sarana Kearsipan	69.200.000	8.250.000	11,92
Rata-rata					79,61

Berdasarkan tabel 4.3, terdapat 2 kegiatan dengan nilai ekonomis 100% dan 85 kegiatan dengan nilai efisiensi dibawah 100%.

Peneliti melakukan perhitungan ekonomis pada program di tahun 2020 pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.

Tabel 4.4
Hasil Perhitungan Ekonomis Program Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau tahun 2020

NO	PROGRAM	Kegiatan	anggaran (Rp)	realisasi (Rp)	ekonomis (%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	420.006.805	419.132.830	99,79
		2 Pengelolaan Barang Milik Daerah Opd	58.500.000	56.535.000	96,64
		3 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.993.000	10.352.000	54,50

NO	PROGRAM	Kegiatan	anggaran (Rp)	realisasi (Rp)	ekonomis (%)
		4 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	868.717.718	783.409.224	90,18
		5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	559.495.000	548.150.000	97,97
		6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	32.600.000	32.233.300	98,88
		7 Penyediaan Makan Dan Minuman	96.867.000	61.301.000	63,28
		8 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	1.820.700.000	1.793.460.000	98,50
		9 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	474.255.000	473.410.000	99,82
		10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	130.238.122	129.208.800	99,21
		11 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	234.400.000	232.695.000	99,27
		12 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	92.800.000	76.877.385	82,84

NO	PROGRAM	Kegiatan	anggaran (Rp)	realisasi (Rp)	ekonomis (%)
		13 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	61.575.500	61.561.000	99,98
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	14 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Operasional	67.280.978	67.209.895	99,89
		15 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	95.000.000	94.897.000	99,89
		16 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan	-	-	-
		17 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	-	-	-
		18 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	15.000.000	14.850.000	99,00
		19 Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan	15.616.000	15.548.057	99,56
		3	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	20 Promosi Dan Edukasi Pangan Lokal	-
21 Diversifikasi Produk Pangan Lokal	100.000.000			93.770.050	93,77
22 Peningkatan Pengendalian Kerentanan Pangan	128.856.140			80.186.600	62,23

NO	PROGRAM	Kegiatan	anggaran (Rp)	realisasi (Rp)	ekonomis (%)
		23 Pengelolaan Sistem Kewaspadaan Pangan Dan Gizi	28.268.640	20.235.251	71,58
		24 Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan	100.000.000	90.409.240	90,41
		25 Analisi Situasi Konsumsi Pangan Penduduk	-	-	-
		26 Analisis Ketersediaan Pangan	-	-	-
		27 Penanganan Daerah Rawan Pangan Kronis	37.268.440	35.524.440	95,32
		28 Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Kab/Kota	-	-	-
		29 Sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	100.000.000	91.826.000	91,83
		30 Pengembangan Ketersediaan Pangan Lokal	124.290.000	10.326.000	8,31
		31 Jaringan Distribusi Dan Pasokan Pangan	60.000.000	57.240.000	95,40

NO	PROGRAM	Kegiatan	anggaran (Rp)	realisasi (Rp)	ekonomis (%)
		32 Penguata Cadangan Pangan Pemerintahan Daerah Riau	73.724.600	10.543.000	14,30
		33 Penyusunan Rancangan Penetapan Harga Minimum Pangan Lokal	16.885.600	14.275.600	84,54
4	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Pertanian	34 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Upt. Balai Pelatihan Penyuluh Pertanian	356.236.000	354.295.088	99,46
		35 Pengandaian Opt Tanaman Pangan Hortikultura	204.598.068	196.484.000	96,03
		36 Perluasan Areal Tanaman Pangan Melalui Rehabilitasi Sawah Terlantar	100.000.000	98.517.500	98,52
		37 Pengembangan Dan Perbaikan Irigasi Tersier	682.370.000	658.075.000	96,44
		38 Pengembangan Sumber Air Pertanian Melalui Irigasi Perpompaan	421.730.000	417.537.000	99,01
		39 Pembangunan Jalan Pertanian	50.160.000	49.800.000	99,28

NO	PROGRAM	Kegiatan	anggaran (Rp)	realisasi (Rp)	ekonomis (%)
		40 Peningkatan Ekstensifikasi Tanaman Serealia	1.023.625.000	866.677.650	84,67
		41 Intensifikasi Tanaman Serealia	1.431.067.750	1.195.788.577	83,56
		42 Pengembangan Tanaman Sayuran Dan Biofarmaka	265.424.000	258.012.300	97,21
		43 Pembinaan Dan Pengadaan Alat Pasca Panen Dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	1.181.420.000	1.112.527.500	94,17
		44 Pengembangan Kawasan Produksi Buah-Buahan Dan Tanaman Hias	134.764.000	129.959.000	96,43
		45 Intensifikasi Tanaman Hortikultura	233.357.100	228.169.600	97,78
		46 Peningkatan Ekstensifikasi Tanaman Aneka Kacang-Kacangan Dan Umbi-Umbian (Akabi)	292.420.000	283.107.250	96,82
		47 Pengembangan Perbenihan	1.000.228.511	983.512.750	98,33

NO	PROGRAM	Kegiatan	anggaran (Rp)	realisasi (Rp)	ekonomis (%)
		Tanaman Pangan, Hortikultura			
		48 Penumbuhan Dan Pengembangan Penangkar Bibit/Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura	-	-	-
		49 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Upt Perbenihan Dan Sertifikasi Benih Tph Dan Perkebunan (Dak)	1.663.799.000	260.480.000	15,66
		50 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Upt Perbenihan Dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	260.203.608	259.183.000	99,61
		51 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Upt. Balai Proteksi Tph Bun	262.256.719	260.010.279	99,14
		52 Pembinaan Dan Pengadaan Alat Pasca Panen Dan Pngolahan Hasil	147.889.800	125.963.700	85,17

NO	PROGRAM	Kegiatan	anggaran (Rp)	realisasi (Rp)	ekonomis (%)
		Hortikultura			
		53 Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura	61.110.960	60.975.300	99,78
		54 Penilaian Kultivar Dan Pengujian Benih Tanaman Pangan Hortikultura	27.864.000	27.756.500	99,61
5	Program Pemberdayaan Penyuluhan	55 Pelatihan Petani Dan Petugas Tanaman Pangan Hortikultura	64.576.800	64.576.800	100,00
		56 Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	123.600.000	117.919.000	95,40
		57 Pekan Nasional Ktna	3.065.000	3.065.000	100,00
rata-rata					88,38

Berdasarkan tabel 4.4 terdapat 55 kegiatan dengan nilai ekonomis dibawah 100% dan 2 kegiatan dengan nilai ekonomis 100%.

Indikator *value for money* yang kedua adalah efisiensi. Berikut cara mengukur tingkat efisiensi menurut Mahsun (2013):

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

dimana *output* adalah persentase capaian fisik kegiatan dan *input* merupakan persentase ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau pada tahun tersebut. Berikut perhitungan efisiensi ada setiap program Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau tahun 2019.

Tabel 4.5
Hasil Perhitungan Efisiensi Program Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau tahun 2019

No	Program	Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi (%)
1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Peyampaian Opd Dan Ppkd	95,00	99,45	95,53
		2. Penyusunan Rencana Kerja Skpd	97,76	78,16	125,08
		3. Penyusunan Rencana Strategis Skpd	88,56	69,51	127,41
2	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	4. Penumbuhan Dan Pengembangan Kawasan Produksi Padi	100,00	94,53	105,79
		5. Penumbuhan Dan Pengembangan Kawasan Produksi Jagung	100,00	89,20	112,11

No	Program	Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi (%)
		6. Penumbuhan Dan Pengembangan Kawasan Produksi Buah-Buahan Dan Tanaman Hias	100,00	95,00	105,26
		7. Penumbuhan Dan Pengembangan Kawasan Produksi Sayur-Sayuran Dan Tanaman Obat-Obatan	99,68	89,71	111,11
		8. Penyediaan Alat Mekanisasi Perkebunan	58,96	54,67	107,85
		9. Pembinaan Dan Pemantauan Pupuk Dan Pestisida Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	100,00	88,64	112,82
		10. Rehabilitas Jalan Produksi	96,17	87,38	110,06
		11. Normalisasi Saluran Drainase Pada Areal Perkebunan Rakyat	68,03	66,39	102,47
		12. Perluasan Areal Dan Pengelolaan Lahan Tanaman Pangan Dan Hortikultura	99,75	90,06	110,76
		13. Pengembangan Water Management Di Kawasan Perkebunan	99,56	97,04	102,60

No	Program	Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi (%)
		14. Pengembangan Dan Perbaikan Jaringan Irigasi Tanaman Pangan Dan Hortikultura	100,00	95,49	104,72
		15. Peremajaan Kebun Karet Rakyat	93,47	72,42	129,07
		16. Peremajaan Kebun Kelapa Rakyat	95,36	74,34	128,28
		17. Pembinaan Usaha Perkebunan	93,86	85,25	110,10
		18. Penerbitan Izin Usaha Perkebunan	88,47	52,34	169,03
		19. Pemantauan Dan Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Kebun	90,95	85,09	106,89
		20. Penyediaan Bibit Kelapa Sawit, Karet Dan Kakao	83,47	83,52	99,94
		21. Penumbuhan Dan Pengembangan Kawasan Produksi Aneka Kacang Dan Umbi-Umbian	100,00	93,37	107,10
		22. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (Opt) Perkebunan	92,11	91,22	100,98
		23. Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu	100,00	97,67	102,39

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

No	Program	Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi (%)
		(SI-Pht) Perkebunan			
		24. Pembinaan Petugas Hama Penyakit Dan Cadangan Pestsida Untuk Penanganan Darurat	95,01	93,36	101,77
		25. Pembinaan, Pengawasan, Monitoring Serta Pengendalian Serangan Hama Dan Penyakit Tph	94,83	94,89	99,94
		26. Peningkatan Kapasitas Brigade Proteksi Tanaman, Cadangan Pestsida Dan Pembinaan Kelembagaan Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura	100,00	97,80	102,25
		27. Pengujian Dan Pengawasan Pupuk, Pestsida Dan Hama Penyakit Tanaman Pangan Dan Hortikultura	90,91	93,29	97,45
		28. Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura	86,01	86,64	99,27
		29. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	86,65	46,54	186,18

No	Program	Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi (%)
		30. Pengolahan Dan Pemutakhiran Data Statistik Serta Penyusunan Profil Perkebunan	94,46	51,30	184,13
		31. Penyusunan Data Base Potensi Produksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura	90,56	76,45	118,46
		32. Pembinaan Dan Pengadaan Alat Pasca Panen Tanaman Pangan	100,00	98,96	101,05
		33. Pembinaan Dan Pengadaan Alat Pasca Panen Hortikultura	100,00	80,31	124,52
3	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	34. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Alat Mesin Pertanian Serta Pembinaan Kelembagaan Upja Tanaman Pangan Dan Hortikultura	64,39	42,80	150,44
		35. Rekayasa Teknologi Mekanisasi Pertanian	100,00	79,40	125,94
		36. Dem-Farm Pengembang Komoditi Lada (Pemeliharaan)	93,76	92,96	100,86
		37. Pemeliharaan Kebun Koleksi Tanaman Perkebunan	97,72	94,73	103,16

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

No	Program	Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi (%)
		38. Dem-Farm Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Kebun	42,89	20,57	208,51
		39. Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan	95,46	95,77	99,68
		40. Pengembangan Perbenihan Tanaman Hortikultura	94,61	94,77	99,83
		41. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Upt. Balai Pelatihan Penyuluh Pertanian	100,00	99,99	100,01
		42. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Upt. Balai Proteksi Tanaman Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura	72,36	96,74	74,80
		43. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Upt. Balai Proteksi Tanaman Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura (Dak)	68,53	57,75	118,67

No	Program	Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi (%)
		44. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Upt. Perbenihan Dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	79,81	79,75	100,08
		45. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Upt Perbenihan Dan Sertifikasi Benih Tph Dan Perkebunan (Dak)	47,15	57,53	81,96
		46. Pengawasan Peredaran Dan Sertifikasi Benih Perkebunan	85,70	85,69	100,01
		47. Penilaian Kultivar Dan Pengujian Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura	90,69	90,31	100,42
4	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	48. Pembinaan Mutu Hasil Produk Perkebunan	99,90	91,04	109,73
		49. Penyediaan Alat Pengolahan Hasil Perkebunan	85,58	77,12	110,97
		50. Pembinaan Sistem Pembiayaan, Manajemen, Usaha Dan Kemitraan Usaha	100,00	63,62	157,18

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

No	Program	Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi (%)
5	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	51. Pembinaan Dan Pengawasan Program Pembiayaan Usaha Perkebunan Untuk Program Peremajaan	86,05	63,58	135,34
		52. Pengawasan Pengembalian Kredit Petani	96,24	86,13	111,74
		53. Pelatihan Petani Dan Aparatur Perkebunan	100,00	95,12	105,13
		54. Peningkatan Sdm Petani, Petugas Dan Pelaku Agribisnis Tanaman Pangan Dan Hortikultura	100,00	95,66	104,54
		55. Pengembangan Kelembagaan Diklat	22,18	-	-
		56. Pengembangan Inkubator Usaha Tani	100,00	100,00	100,00
6	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan	57. Mimbar Sarasehan Ktna Se-Provinsi Riau	100,00	71,69	139,49
		58. Penilaian Tenaga Penyuluhan Pertanian	100,00	92,65	107,93
		59. Penyusunan Program Penyuluhan Tingkat Provinsi	100,00	99,15	100,86
		60. Penyelenggaraan Demfarm Padi	100,00	93,38	107,09

No	Program	Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi (%)
		Sawah			
		61. Pekan Daerah Ktna Dan Penyuluhan Swakarsa	100,00	83,86	119,25
7	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	62. Pembangunan Kebun Sagu Rakyat	48,20	33,86	142,35
		63. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	69,15	61,44	112,55
		64. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	68,26	63,38	107,70
		65. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100,00	96,34	103,80
		66. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	89,27	86,74	102,92
		67. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	-	-	-
		68. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	89,99	89,21	100,87
		69. Penyediaan Alat Tulis Kantor	85,00	79,38	107,08
		70. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	90,00	84,80	106,13
		71. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-
8	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

No	Program	Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi (%)
		72. Penyediaan Makanan Dan Minuman	100,00	86,47	115,65
		73. Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi Dan Kehumasan Skpd	80,96	76,39	105,98
		74. Penyediaan Administrasi Kepegawaian	100,00	93,01	107,52
		75. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	63,23	35,05	180,40
		76. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (K2)	100,00	100,00	100,00
		77. Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	83,94	81,54	102,94
		78. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	66,60	63,16	105,45
		79. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	95,00	94,50	100,53
9	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80. Pendidikan Dana Pelatihan Formal	76,55	54,41	140,69
		81. Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	100,00	95,24	105,00
		82. Pendidikan Dan Pelatihan Non Formal	57,24	40,94	139,81

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

No	Program	Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi (%)
10	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	83. Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur	98,00	82,04	119,45
11	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	84. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	9,54	-	-
		85. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	10,00	-	-
		86. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	82,42	70,49	116,92
		87. Penyediaan Sarana Kearsipan	88,29	11,92	740,69
rata-rata					122,44

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.5 program yang dilaksanakan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau pada tahun 2019 terdapat 14 kegiatan dengan nilai efisien dibawah 100%, 2 kegiatan dengan nilai efisien 100% dan 71 kegiatan dengan nilai efisien di atas 100%.

Peneliti juga melakukan perhitungan nilai efisien pada program tahun 2020 Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.

Tabel 4.6
Hasil Perhitungan Efisien Program Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau tahun 2020

NO	PROGRAM	Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi (%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	100	99,79	100,21

NO	PROGRAM	Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi (%)
		2 Pengelolaan Barang Milik Daerah Opd	96,64	96,64	100,00
		3 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	75,32	54,5	138,20
		4 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99,66	90,18	110,51
		5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100	97,97	102,07
		6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor	100	98,88	101,13
		7 Penyediaan Makan Dan Minuman	83,36	63,28	131,73
		8 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	100	98,5	101,52
		9 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	100	99,82	100,18
		10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	99,21	99,21	100,00
		11 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	99,8	99,74	100,06
		12 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	100	82,84	120,71
		13 Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	100	99,98	100,02
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	14 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Operasional	99,89	99,89	100,00

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

NO	PROGRAM	Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi (%)
	Aparatur	15 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	99,98	99,89	100,09
		16 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan	-	-	-
		17 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	-	-	-
		18 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	99	99	100,00
		19 Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan	100	99,56	100,44
3	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	20 Promosi Dan Edukasi Pangan Lokal	-	-	-
		21 Diversifikasi Produk Pangan Lokal	93,77	93,77	100,00
		22 Peningkatan Pengendalian Kerentanan Pangan	80,73	62,22	129,75
		23 Pengelolaan Sistem Kewaspadaan Pangan Dan Gizi	71,58	71,58	100,00
		24 Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan	91,48	90,41	101,18
		25 Analisi Situasi Konsumsi Pangan Penduduk	-	-	-
		26 Analisis Ketersediaan Pangan	-	-	-
		27 Penanganan Daerah Rawan Pangan Kronis	95,86	95,32	100,57

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

NO	PROGRAM	Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi (%)
		28 Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Kab/Kota	-	-	-
		29 Sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	100	91,83	108,90
		30 Pengembangan Ketersediaan Pangan Lokal	10,75	8,31	129,36
		31 Jaringan Distribusi Dan Pasokan Pangan	95,4	95,4	100,00
		32 Penguata Cadangan Pangan Pemerintahan Daerah Riau	14,3	14,3	100,00
		33 Penyusunan Rancangan Penetapan Harga Minimum Pangan Lokal	95,29	84,54	112,72
4	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Pertanian	34 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Upt. Balai Pelatihan Penyuluh Pertanian	99,75	99,46	100,29
		35 Pengandaian Opt Tanaman Pangan Hortikultura	100	96,03	104,13
		36 Perluasan Areal Tanaman Pangan Melalui Rehabilitasi Sawah Terlantar	100	98,52	101,50
		37 Pengembangan Dan Perbaikan Irigasi Tersier	100	96,44	103,69
		38 Pengembangan Sumber Air Pertanian Melalui Irigasi Perpompaan	100	99,01	101,00
		39 Pembangunan Jalan Pertanian	100	99,28	100,73

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

NO	PROGRAM	Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi (%)
		40 Peningkatan Ekstensifikasi Tanaman Serealia	93,18	84,67	110,05
		41 Intensifikasi Tanaman Serealia	100	83,56	119,67
		42 Pengembangan Tanaman Sayuran Dan Biofarmaka	100	97,21	102,87
		43 Pembinaan Dan Pengadaan Alat Pasca Panen Dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	100	94,17	106,19
		44 Pengembangan Kawasan Produksi Buah-Buahan Dan Tanaman Hias	100	96,43	103,70
		45 Intensifikasi Tanaman Hortikultura	100	97,78	102,27
		46 Peningkatan Ekstensifikasi Tanaman Aneka Kacang-Kacangan Dan Umbi-Umbian (Akabi)	99	96,82	102,25
		47 Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan, Hortikultura	100	98,33	101,70
		48 Penumbuhan Dan Pengembangan Penangkar Bibit/Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura	-	-	-
		49 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Upt Perbenihan Dan Sertifikasi Benih Tph Dan Perkebunan (Dak)	-	-	-

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

NO	PROGRAM	Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi (%)
		50 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Upt Perbenihan Dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	100	99,61	100,39
		51 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Upt. Balai Proteksi Tph Bun	100	99,14	100,87
		52 Pembinaan Dan Pengadaan Alat Pasca Panen Dan Pngolahan Hasil Hortikultura	100	85,17	117,41
		53 Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura	100	99,78	100,22
		54 Penilaian Kultiyar Dan Pengujian Benih Tanaman Pangan Hortikultura	100	99,61	100,39
5	Program Pemberdayaan Penyuluhan	55 Pelatihan Petani Dan Petugas Tanaman Pangan Hortikultura	100	100	100,00
		56 Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	99,31	95,4	104,10
		57 Pekan Nasional Ktna	100	100	100,00
rata-rata					105,57

Dari hasil perhitungan tabel 4.6 terdapat 8 kegiatan dengan nilai efisien dibawah 100%, 10 kegiatan dengan nilai efisien 100% dan 39 kegiatan lainnya dengan nilai efisiensi di atas 100%.

Indikator terakhir pada *value for money* adalah efektifitas. Berikut adalah cara perhitungannya:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

dimana outcome adalah nilai capaian kerja atau keluaran dari program yang dilaksanakan dan output adalah angka rencana awal yang telah ditetapkan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau pada tahun tertentu. Berikut perhitungan efektifitas ada setiap program Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau tahun 2019.

Tabel 4.7
Hasil Perhitungan Efektivitas Program Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau tahun 2019

No	Program	Kegiatan	Target Fisik (%)	Capaian Fisik (%)	efektivitas (%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7347	6345	86,36
		2 Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12	12	100,00
		3 Penyedia Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	170	143	84,12
		4 Penyedia Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	120	80	66,67
		5 Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	12	12	100,00
		6 Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	12	12	100,00
		7 Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	108	0	0,00

No	Program	Kegiatan	Target Fisik (%)	Capaian Fisik (%)	efektivitas (%)
		8 Penyedia Alat Tulis Kantor	35	30	85,71
		9 Penyedia Barang Cetakan Dan Penggandaan	28	26	92,86
		10 Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	300	30	10,00
		11 Penyedia Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	13	0	0,00
		12 Penyedia Peralatan Rumah Tangga	156	0	0,00
		13 Penyedia Bahan Logistik Kantor	28	0	0,00
		14 Penyedia Makanan Dan Minuman	27340	27340	100,00
		15 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	410	390	95,12
		16 Penyedia Jasa Keamanan Kantor	12	12	100,00
		17 Penyedia Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi Dan Kehumasan SKPD	30	26	86,67
		18 Penyediaan Administrasi Kepegawaian	12	6	50,00
		19 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (K2)	14	14	100,00
2	Program Peningkat Sarana Dan Prasarana Aparatur	20 Penggadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1	0	0,00

No	Program	Kegiatan	Target Fisik (%)	Capaian Fisik (%)	efektivitas (%)	
		21	Pengadaan Peralatan Gedung Dan Kantor	16	0	0,00
		22	Pengadaan Mebeleur	21	0	0,00
		23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	5	0	0,00
		24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1	0	0,00
		25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	15	6	40,00
		26	Penyediaan Saraa Kearsipan	9	8	88,89
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	27	Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur	90	89	98,89
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	28	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	25	20	80,00
		29	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	80	78	97,50
		30	Pendidikan Dan Pelatihan Non Formal	96	56	58,33
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	31	Penyusunan Rencana Kerja Skpd	1	1	100,00
		32	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	1	1	100,00
		33	Penyusunan Pelaporan Keuangan OPD Dan PPKD	2	2	100,00
6	Program Peningkatan Kesejahteraan	34	Pelatihan Petani Dan Aparatur Perkebunan	206	206	100,00

No	Program	Kegiatan	Target Fisik (%)	Capaian Fisik (%)	efektivitas (%)	
	Petani	35	Peningkatan SDM Petani, Petugas Dan Pelaku Agribisnis Tanaman Pangan Dan Hortikultura	30	30	100,00
		36	Pengebangan Kelembagaan Diklat	1	0,25	25,00
		37	Pembinaan Dan Pengawasan Program Pembiayaan Usaha Perkebunan Untuk Program Peremajaan	6	6	100,00
		38	Pengawasan Pengembalian Kredit Petani	10000	9700	97,00
7	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	39	Pengembangan Inkubator Usaha Tani	10	10	100,00
		40	Pembangunan Kebun Sagu Rakyat	125	0	0,00
		41	Pembinaan Mutu Hasil Produksi Perkebunan	4	4	100,00
8	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	42	Pembinaan Sistem Pembiayaan, Manajemen Usaha Dan Kemitraan Usaha	36	36	100,00
		43	Penyediaan Alat Pengolahan Hasil Perkebunan	12	12	100,00
9	Program Peningkatan Penerapan Teknologi	44	Dem-Farm Pengembangan Komoditi Lada (Pemeliharaan)	3	3	100,00

No	Program	Kegiatan	Target Fisik (%)	Capaian Fisik (%)	efektivitas (%)
	Pertanian/Perkebunan	45 Dem-Farm Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Kebun	2	1	50,00
46 Pengawasan Peredaran Dan Sertifikasi Benih Perkebunan		30000	25800	86,00	
47 Pembinaan Dan Pengadaan Alat Pasca Panen Tanaman Pangan		7	7	100,00	
		48 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Alat Mesin Pertanian Serta Pembinaan Kelembagaan UPJA Tanaman Pangan Dan Hortikultura	13	3	23,08
49 Pembinaan Dan Pengadaan Alat Pasca Hortikultura		15	15	100,00	
50 Penilaian Kultivar Dan Pengujian Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura		15	13	86,67	
51 Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan		29600	29500	99,66	
52 Pengembangan Perbenihan Tanaman Hortikultura		3,5	3,5	100,00	
53 Rekayasa Teknologi Mekanisasi Pertanian		2	2	100,00	
54 Pemeliharaan Kebun Koleksi Tanaman		3	3	100,00	

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

No	Program	Kegiatan	Target Fisik (%)	Capaian Fisik (%)	efektivitas (%)
		Perkebunan			
		55 Peningkatan Sarana Dan Prasarana UPT Perbenihan Dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	7	7	100,00
		56 Peningkatan Sarana Dan Prasarana UPT Balai Pelatihan Penyuluhan Pertanian	1	1	100,00
		57 Pengadaan Sarana Dan Prasarana UPT Balai Proteksi Tanaman Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura	1	0,95	95,00
		58 Peningkatan Sarana Dan Prasarana UPT Perbenihan Dan Sertifikasi Benih TPH Dan Perkebunan (DAK)	4	2	50,00
		59 Pengadaan Sarana Dan Prasarana UPT Balai Proteksi Tanaman Perkebunan, Tanaman Pagan Dan Hortikultura (DAK)	3	2	66,67
10	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	60 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	1	1	100,00
		61 Peremajaan Kebun Karet Rakyat	80	30	37,50

No	Program	Kegiatan	Target Fisik (%)	Capaian Fisik (%)	efektivitas (%)
		62 Peremajaan Kebun Kelapa Rakyat	100	85	85,00
		63 Penyediaan Bibit Kelapa Sawit, Karet Dan Kakao	13000	10920	84,00
		64 Pembinaan Usaha Perkebunan	6	6	100,00
		65 Penerbitan Izin Usaha Perkebunan	10	8	80,00
		66 Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	100	93	93,00
		67 Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PTH) Perkebunan	40	40	100,00
		68 Pemantauan Dan Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Kebun	8	8	100,00
		69 Pembinaan Petugas Hama Penyakit Dan Cadangan Pestisida Untuk Penanganan Darurat	5	5	100,00
		70 Pengolahan Dan Pemutakhiran Data Statistik Serta Penyusunan Profil Perkebunan	150	150	100,00
		71 Rehabilitasi Jalan Produksi	1965	4105	208,91
		72 Normalisasi Saluran Drainase Pada Areal Perkebunan Rakyat	4720	6720	142,37

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

No	Program	Kegiatan	Target Fisik (%)	Capaian Fisik (%)	efektivitas (%)
		73 Penumbuhan Dan Pengembangan Kawasan Produksi Padi	1000	1000	100,00
		74 Penumbuhan Dan Pengembangan Kawasan Produksi Jagung	225	225	100,00
		75 Penumbuhan Dan Pengembangan Kawasan Produksi Aneka Kacang Dan Umbi-Umbian	60	100	166,67
		76 Penumbuhan Dan Pengembangan Kawasan Produksi Buah-Buahan Dan Tanaman Hias	40	40	100,00
		77 Penumbuhan Dan Pengembangan Kawasan Produksi Sayur-Sayuran Dan Tanaman Obat-Obatan.	11,5	11,5	100,00
		78 Peningkatan Kapasitas Brigade Proteksi Tanaman, Cadangan Pestisida Dan Pembinaan Kelembagaan Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura	12	12	100,00
		79 Pembinaan, Pengawasan, Monitoring Serta Pengendalian Serangan Hama Dan Penyakit TPH	12	12	100,00

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

No	Program	Kegiatan	Target Fisik (%)	Capaian Fisik (%)	efektivitas (%)
		80 Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura	50000	39000	78,00
		81 Pengembangan Dan Perbaikan Jaringan Irigasi Tanaman Pangan Dan Hortikultura	2623	2630	100,27
		82 Perluasan Areal Dan Pengelolaan Lahan Tanaman Pangan Dan Hortikultura	73	73	100,00
		83 Penyusunan Data Base Potensi Produksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura	85	85	100,00
		84 Pembangunan Water Management Di Kawasan Perkebunan	7	5	71,43
		85 Penyediaan Alat Mekanisasi Perkebunan	14	6	42,86
		86 Pengujian Dan Pengawasan Pupuk, Pestisida Dan Hama Penyakit Tanaan Pangan Dan Hortikultura	40	37	92,50
		87 Pembinaan Dan Pemantauan Pupuk Dan Pestisida Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	12	12	100,00
11	Program Pemberdaya Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan	88 Mimbar Serasehan Ktna Se-Provinsi Riau	30	30	100,00
		89 Penilaian Tenaga Penyuluh Pertanian	21	21	100,00

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

No	Program	Kegiatan	Target Fisik (%)	Capaian Fisik (%)	efektivitas (%)
		90 Penyusunan Program Penyuluhan Tingkat Provinsi	60	60	100,00
		91 Penyelenggaraan Demfarm Padi Sawah	3	3	100,00
		92 Pekan Daerah KTNA Dan Penyuluh Swakarsa	40	40	100,00
rata-rata					82,23

Menurut perhitungan tabel 4.7 pada program yang dilaksanakan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdapat 4 kegiatan yang memiliki nilai efektifitas di atas 100%, 46 kegiatan yang memiliki nilai 100% dan 42 kegiatan yang memiliki nilai efektifitas dibawah 100%.

Peneliti juga melakukan perhitungan efektifitas pada kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura di tahun 2020.

Tabel 4.8
Hasil Perhitungan Efektivitas Program Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau tahun 2020

No	Program	Kegiatan	Target Fisik (%)	Capaian Fisik (%)	efektivitas (%)
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1 penyediaan jasa surat menyurat	3449	2310	66,98
		2 penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	144	144	100,00

No	Program	Kegiatan	Target Fisik (%)	Capaian Fisik (%)	efektivitas (%)			
		3	penyedia peralatan dan perlengkapan kantor	5	5	100,00		
		4	penyedia jasa kebersihan kantor	12	12	100,00		
		5	penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	83	83	100,00		
		6	penyediaan alat tulis kantor	35	35	100,00		
		7	penyedia barang cetakan dan pengadaan	28	28	100,00		
		8	penyedia komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8	8	100,00		
		9	penyedia makan dan minuman	12300	12300	100,00		
		10	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	292	292	100,00		
		11	penyedia jasa administrasi kantor	74	74	100,00		
		12	penyedia jasa keamanan kantor	9	9	100,00		
		13	penyedia barang milik daerah OPD	50	50	100,00		
		2	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	14	pengadaan perlengkapan gedung kantor	16	16	100,00
				15	pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	3	3	100,00

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

No	Program	Kegiatan	Target Fisik (%)	Capaian Fisik (%)	efektivitas (%)
		16 pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/Operasional	44	44	100,00
		17 pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	200	200	100,00
		18 pengembangan ketersediaan pangan lokal	1	1	100,00
		19 jaringan distribusi dan pasokan pangan	4	4	100,00
		20 penguatan cadangan pangan pemerintah daerah riau	1	1	100,00
		21 penyusunan rancangan penetapan harga minimum pangan lokal	1	1	100,00
3	program peningkatan ketahanan pangan	22 diversifikasi produk pangan lokal	9	9	100,00
		23 peningkatan pengendalian kerentangan pangan	90	90	100,00
		24 pengelolaan sistem kewaspadaan pangan dan gizi	24	24	100,00
		25 pengelolaan pemanfaatan pekarangan	8	8	100,00
		26 penanganan daerah rawan kronis	2	2	100,00
		27 sertifikasi pangan segar asal tumbuh (PSAT)	16	16	100,00

No	Program	Kegiatan	Target Fisik (%)	Capaian Fisik (%)	efektivitas (%)	
4	program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian	28	perluasan areal tanaman pangan melalui rehabilitasi sawah terlantar	0	0	0,00
		29	peningkatan ekstensifikasi tanaman sereal	880	820	93,18
		30	peningkatan ekstensifikasi tanaman aneka kacang-kacangan dan umbi-umbian	100	100	100,00
		31	pengembangan kawasan produksi buah buahan dan tanaman hias	15	15	100,00
		32	pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura	210200	210200	100,00
		33	penilaian kultivar dan pengujian benih tanaman pangan hortikultura	20000	20000	100,00
		34	intensifikasi tanaman hortikultura	45	45	100,00
		35	intensifikasi tanaman sereal	600	600	100,00
		36	pengembangan tanaman sayuran dan biofarmaka	8	8	100,00
		37	pengembangan perbenihan tanaman pangan, hortikultura	30	30	100,00
		38	pengendalian OPT tanaman pangan hortikultura	2,5	3	120,00

No	Program	Kegiatan	Target Fisik (%)	Capaian Fisik (%)	efektivitas (%)
		39 pengembangan dan perbaikan irigasi tersier	0	0	0
		40 pengembangan sumber air pertanian melalui irigasi perpompaan	0	0	0
		41 pembangunan jalan pertanian	0	0	0
		42 pembinaan dan pengadaan alat pasca panen dan pengolahan hasil hortikultura	3	3	100,00
		43 pembinaan dan pengadaan alat pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan	8	8	100,00
		44 peningkatan sarana dan prasarana UPT. Perbenihan dan sertifikasi benih	4	4	100,00
		45 peningkatan sarana dan prasarana UPT. Balai proteksi TPh Bun	4	4	100,00
		46 peningkatan sarana dan prasarana UPT. Balai pelatihan penyuluhan	4	4	100,00
		47 peningkatan sarana dan prasarana UPT. Perbenihan dan sertifikasi benih	1	0	0,00

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

No	Program	Kegiatan	Target Fisik (%)	Capaian Fisik (%)	efektivitas (%)
5	program pemberdayaan kelembagaan penyuluhan pertanian	48 pelatihan pertanian dan petugas tanaman pangan hortikultura	75	75	100,00
		49 pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penyuluhan	70	70	100,00
		50 pekan nasional KTNA	0	0	0,00
rata-rata					87,60

Dari hasil perhitungan tabel 4.8 terdapat 1 kegiatan pada program yang dilaksanakan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura yang memiliki nilai efektivitas di atas 100%, 41 kegiatan yang memiliki nilai efektivitas 100% dan 8 kegiatan yang memiliki nilai efektivitas di bawah 100%.

4.3 Pembahasan Perhitungan *Value For Money* Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2019 Dan 2020

Value For Money merupakan metode perhitungan untuk menilai kinerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan 3 kriteria yaitu ekonomis, efektifitas dan efisiensi. Dalam hal ini tujuan yang di inginkan oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *value for money* yaitu : ekonomis (hemat cermat) dalam penggandaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, dan efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Menurut Mahsun (2013), kriteria ekonomic adalah jika diperoleh nilai perbandingan kurang dari 100% maka dinyatakan kegiatan tersebut economic, jika diperoleh nilai perbandingan sama dengan 100% maka kegiatan tersebut dinyatakan sebagai economic berimbang dan jika diperoleh nilai perbandingan lebih dari 100% maka dapat dinyatakan kegiatan tersebut tidak economic. Kriteria efisien yaitu jika diperoleh nilai perbandingan kurang dari 100% maka dinyatakan kegiatan tersebut tidak efisien. Jika diperoleh nilai perbandingan sama dengan 100% maka kegiatan tersebut dinyatakan efisien berimbang dan jika diperoleh nilai perbandingan lebih dari 100% maka kegiatan tersebut dinilai efisien. Terakhir, kriteria efektivitas adalah jika diperoleh nilai perbandingan kurang dari 100% maka dapat dinyatakan tidak efektif. Jika diperoleh nilai perbandingan sama dengan 100% maka dinyatakan efektivitas berimbang dan jika diperoleh nilai perbandingan lebih dari 100% maka dapat dinyatakan efektif.

Pada tahun 2019 terdapat 2 kegiatan dengan nilai economic 100% yang dapat dinyatakan sebagai economic berimbang, dimana anggaran telah diserap sepenuhnya pada kegiatan tersebut. 85 kegiatan lainnya memiliki nilai economic dibawah 100% dapat di artikan telah berjalan economic, dimana dana yang digunakan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura pada kegiatan tersebut dibawah dari anggaran yang telah tersedia. Pada tahun 2020 terdapat 2 kegiatan dengan nilai economic 100% yang dapat dinyatakan sebagai economic berimbang, dimana anggaran yang tersedia telah digunakan sepenuhnya oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, 55 kegiatan lainnya memiliki nilai ekonomic dibawah 100% dapat dinyatakan sebagai economic yang artinya

dana yang digunakan pada kegiatan tersebut lebih kecil dari anggaran yang tersedia.

Pada tahun 2019 terdapat 14 kegiatan dengan nilai efisien dibawah 100% yaitu tidak efisien dimana presentasi fisik yang dilaksanakan lebih rendah dari presentasi anggaran yang telah ditetapkan. Terdapat 2 kegiatan dengan nilai efisien sama dengan 100% dapat dinyatakan dengan efisien berimbang, yang artinya presentasi fisik yang telah dilaksanakan sama dengan presentasi anggaran yang ada, dan terdapat 71 kegiatan dengan efisien yang artinya presentasi fisik lebih tinggi dari presentasi anggaran yang ada. Pada tahun 2020 terdapat 8 kegiatan dengan nilai efisien di bawah 100% dapat di artikan dengan tidak efisien dimana nilai presentasi fisik lebih kecil dibandingkan anggaran yang telah ditetapkan. Terdapat 10 kegiatan dengan nilai efisien sama dengan 100% dapat di artikan dengan efisien berimbang, dimana nilai persentase fisik sama dengan nilai anggaran yang ada dan terdapat 39 kegiatan dengan nilai efisien di atas 100% dapat di artikan dengan efisien yaitu nilai persentase fisik di atas nilai anggaran yang telah di tetapkan.

Nilai efektifitas pada tahun 2019 terdapat 42 kegiatan dengan nilai efektifitas di bawah 100% dapat dinyatakan sebagai tidak efektif yang artinya realisasi hasil kegiatan kurang dari anggaran yang telah di tetapkan. Terdapat 46 kegiatan dengan nilai efektifitas sama dengan 100% yang dapat dinyatakan dengan efektif berimbang yang artinya realisasi hasil kegiatan sama dengan anggaran yang telah di tetapkan dan terdapat 4 kegiatan dengan nilai efektifitas di atas 100% yang dapat dinyatakan dengan efektif yang artinya realisasi hasil

kegiatan lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020 terdapat 8 kegiatan dengan nilai efektifitas dibawah 100% dapat dinyatakan dengan tidak efisien dimana realisasi hasil kegiatan kurang dari anggaran yang telah ditetapkan. Terdapat 41 kegiatan dengan nilai efektifitas sama dengan 100% dapat dinyatakan dengan efektifitas berimbang yang artinya realisasi hasil kegiatan sama dengan anggaran yang telah ditetapkan dan terdapat 1 kegiatan dengan nilai efektifitas diatas 100% dapat dinyatakan dengan efektif yang artinya realisasi hasil kegiatan lebih tinggi dari anggaran yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2019 terdapat 4 kegiatan yang memenuhi kriteria ketiga elemen *value for money* yaitu kegiatan rehabilitas jalan produksi, kegiatan normalisasi saluran drainase pada areal perkebunan rakyat, kegiatan penumbuhan dan pengembangan kawasan produksi aneka kacang dan umbi-umbian dan kegiatan pengembangan dan perbaikan jaringan irigasi tanaman pangan dan hortikultura. Pada tahun 2020 hanya terdapat 1 kegiatan yang memenuhi kriteria ketiga elemen *value for money* yaitu kegiatan Pengendalian OPT tanaman pangan hortikultura. Kegiatan-kegiatan yang telah memenuhi kriteria ketiga elemen *value for money* ini merupakan kegiatan yang dikelola dengan baik dibanding kegiatan lainnya yang artinya pengelolaan organisasi pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura belum berjalan dengan baik.

Berikut hasil dari perhitungan tingkat ekonomis,efisiensi dan efektifitas pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura Provinsi Riau.

Tabel 4.9
Hasil Perhitungan tingkat Ekonomis, Efisien dan Efektifitas Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau tahun 2019 dan 2020

	2019	2020
nilai	79,61	88,38
kriteria	ekonomis	ekonomis
nilai	122,44	105,57
kriteria	efisien	efisien
nilai	82,23	87,6
kriteria	tidak efektif	tidak efektif

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program yang dilaksanakan pada tahun 2019 dan 2020 oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura hanya memenuhi 2 kriteria dari *Value For Money* yaitu Ekonomis dan Efisien, sedangkan untuk kriteria terakhir, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dinilai tidak efektif pada tahun 2019 dan 2020. Ini artinya kriteria ekonomis yang merupakan upaya penghematan dari suatu organisasi telah berjalan dengan baik, meskipun ada beberapa kegiatan yang masih belum memenuhi kriteria ekonomis. Pada kriteria efisien yang merupakan perbandingan antara *input* dan *output* pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura telah dilaksanakan sebaik mungkin dan memenuhi kriteria *Value For Money*, meskipun ada beberapa kegiatan yang nilainya masih dibawah kriteria efisien. Sedangkan untuk kriteria efektif belum berjalan dengan baik sesuai dengan target yang di tentukan, tetapi ada beberapa kegiatan yang sudah memenuhi kriteria efektif. Hal ini disebabkan adanya kendala-kendala teknis yang menyebabkan

tidak efektifnya kegiatan yang telah di rencanakan berjalan dengan sebagaimana seharusnya. Terlihat pada data tabel 4.7 Hasil Perhitungan Efektivitas Program Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2019, ada beberapa kegiatan pada program yang dilaksanakan yang memiliki target fisik namun tidak terdapat capaian fisiknya, hal ini disebabkan oleh pemangkasan anggaran pada pertengahan periode oleh BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). Kegiatan yang mengalami pemangkasan adalah Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional; Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja; Penyediaan Alat Tulis Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor; Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; Pengadaan Mebeleur; Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. Kegiatan tersebut dianggap tidak di perlukan, sehingga anggaran untuk kegiatan yang tertera telah di rasionalkan.

BAB V

SIMPULAN & SARAN

5.1 Simpulan

1. Kinerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau dengan menggunakan konsep *value for money* elemen ekonomis pada tahun 2019 bernilai rata-rata 79,61% bersifat ekonomis dan pada tahun 2020 dengan nilai rata-rata 88,38% bersifat ekonomis.
2. Kinerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau dengan menggunakan konsep *value for money* elemen efisien pada tahun 2019 bernilai rata-rata 122,44% yang artinya efisien dan pada tahun 2020 bernilai rata-rata 105,57% yang artinya efisien.
3. Kinerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau dengan menggunakan konsep *value for money* elemen efektifitas pada tahun 2019 dengan nilai rata-rata 82,23 yang artinya tidak efektif dan pada tahun 2020 dengan nilai rata-rata 87,6% yang artinya tidak efektif yang disebabkan oleh kendala-kendala teknis pada pelaksanaan kegiatan.

5.2 Saran

1. Bagi Dinas, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan mengevaluasi program dan kegiatannya agar dapat memenuhi kriteria Value For Money terutama tingkat efektivitas yang belum terpenuhi oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau dalam meningkatkan Akuntabilitas kinerja, agar terciptanya tata kelola

pemerintahan yang baik (*good governance*)

2. Bagi Peneliti selanjutnya di harapkan dapat mencari lebih banyak data dan informasi agar dapat mendalami masalah yang ada pada Dinas Pangan , Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau



DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Riau. (2019). *Laporan Kinerja Intansi Pemerintah: Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Riau*
- Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Riau. (2020). *Laporan Kinerja Intansi Pemerintah: Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Riau*
- Fahmi, Irham. 2014. *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta
- Faiz, Ihda Arifin. 2020. *Akuntabilitas Organisasi Nirlaba*. Yogyakarta: STIM YKPN
- Halim, Abdul, dan M. Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat
- Husna, Yulia Nurhanifah. 2020. *Analisis Value For Money dalam Pengukuran Kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Periode 2017-2018*. Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN, Batusangkar
- Hutabarat, Francis. 2021. *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan*. Serang: Desenta Muliavisitama
- Kurniawati, Indah. 2020. *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*. Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mahsun, Mohamad. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Mahsun, Mohamad. 2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mangkunegara, A. A. Anwar Prabu. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Nafidah, L.N & Anisa, N. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmu Akuntansi*. 10(2): 273-288.
- Purwiyanti, Dwi. 2017. Analisis Kinerja Berbasis Konsep *Value For Money* Pada Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi (Study Di Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu). *Ejurnal Katalogis*. 5(9): 190-200.

Rahayu, S. 2018. “Penerapan Konsep *Value For Money* dalam Menilai Kinerja Pelayanan Sektor Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang Pinrang” . Akuntansi, FEB, UMM, Makassar.

(<http://distanhor.riau.go.id/kumpulan-data>)



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau